

2021



LAPORAN KINERJA

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN



LAPORAN KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TA 2021



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan berkat izin dan ridha-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 dapat diselesaikan.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran. Oleh karenanya Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan sebagai alat ukur terhadap capaian keberhasilan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021. Walaupun data yang ditampilkan pada LKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan ini masih merupakan data sementara diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan yang akan datang dan tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan atau ketidak sempurnaan baik dalam penyajian formulasinya maupun dalam penyajian isinya. Untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun senantiasa diperlukan bagi kesempurnaan laporan ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja ini diucapkan terima kasih.

Makassar, 09 Mei 2022
KEPALA DINAS



Ir. H. SULKAF S LATIEF, MM
Pangkat : Pembina TK I
N I P : 19630424 198903 1 010

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GRAFIK	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Susunan Organisasi.....	4
1.2. Tugas Pokok	8
1.3. Fungsi	10
1.4. Isu Strategis	13
1.5. Sistematika Penyajian.....	13
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	16
2.1. Perencanaan	16
2.2. Penetapan Kinerja.....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1. Capaian Kinerja Sasaran / IKU	25
3.2. Analisis Capaian Kinerja Sasaran IKU	28
3.3. Realisasi Anggaran.....	98
BAB VIII PENUTUP	108
LAMPIRAN.....	112

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 86 Tahun 2016 telah disusun Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kelautan dan perikanan dan tugas pembantuan.

Adapun uraian Adapun uraian tugas pokok dan fungsi jabatan pada struktural organisasi lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Pergub 86 tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1.1. SUSUNAN ORGANISASI

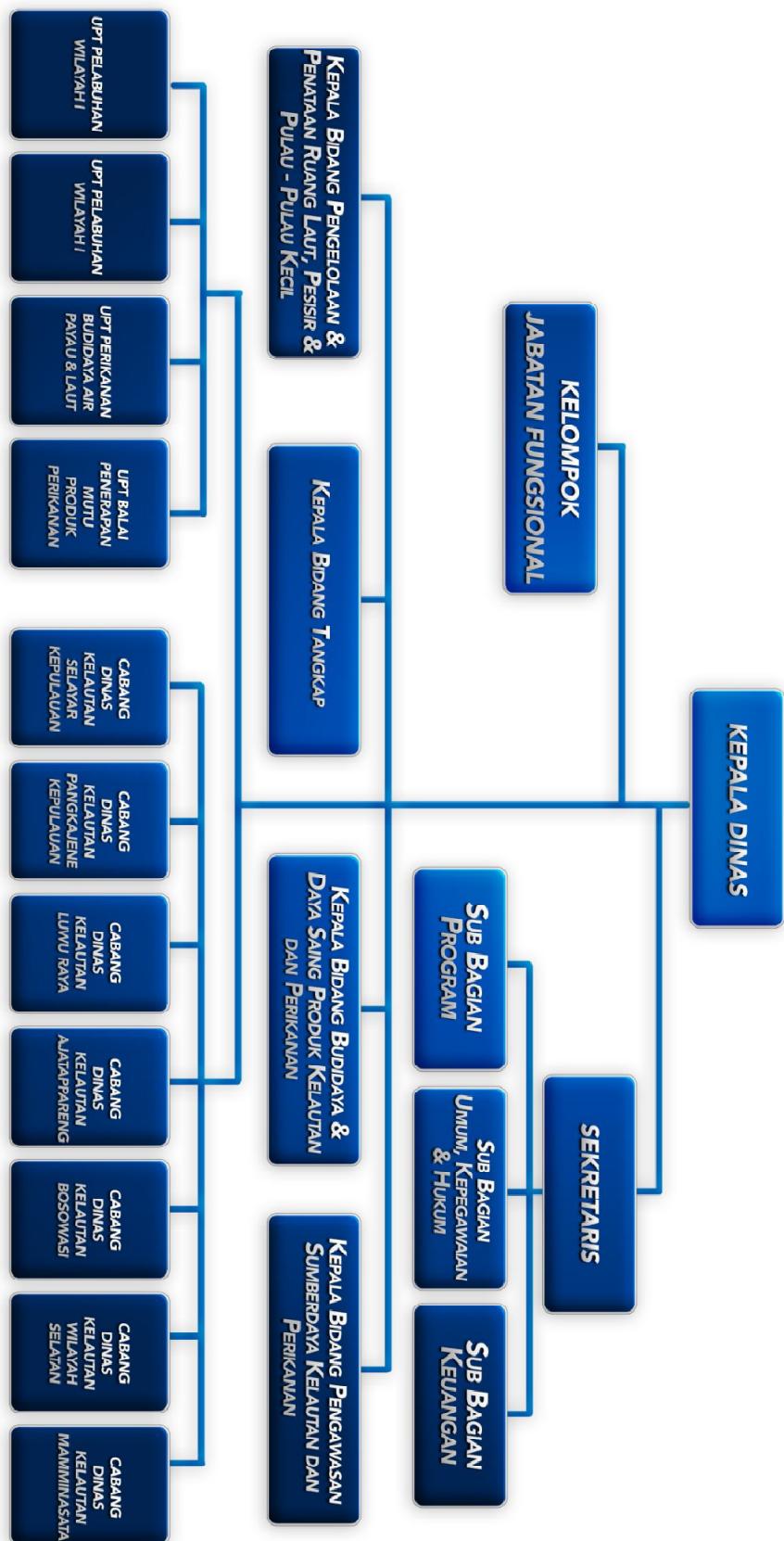
Organisasi perangkat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris membawahi 3 Sub Bagian
3. Kepala Bidang (empat)
4. Kepala UPTD
5. Kepala Cabang Dinas Kelautan (CDK)

Adapun struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR

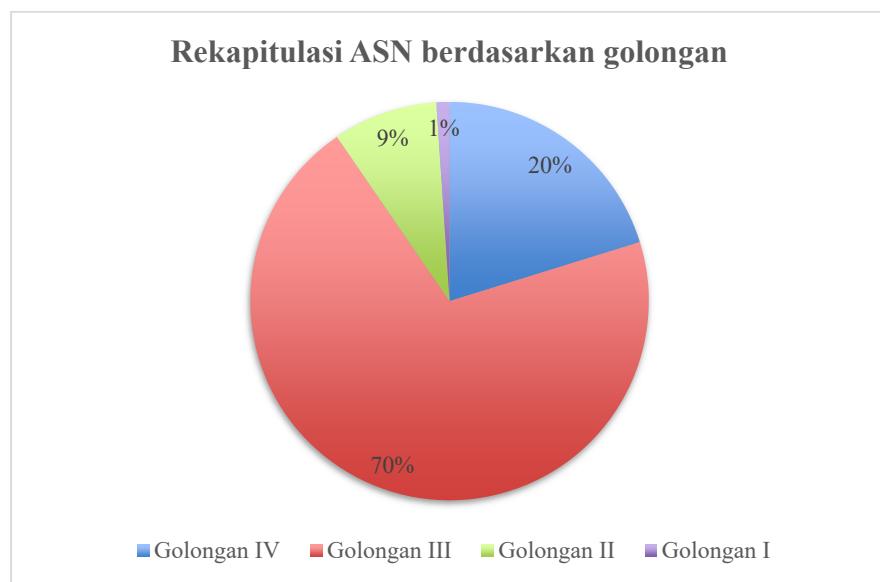
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN



Dalam penunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan salah satu faktor yang penting adalah faktor Sumberdaya Manusia Aparatur. Adapun jumlah PNS yang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sul-Sel sampai dengan akhir bulan Desember 2021 sebagai berikut:

Tabel 1. Sebaran PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sul-Sel TA. 2021 Berdasarkan Golongan/Ruang

No.	Gol. Ruang	A		B		C		D		Jumlah		Total
		L	W	L	W	L	W	L	W	L	W	
1	I	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	2
2	II	1	0	1	0	2	0	9	2	13	2	15
3	III	7	5	10	5	11	13	29	53	57	76	133
4	IV	17	10	10	1	0	0	0	0	27	11	38
Jumlah		25	15	21	6	14	14	38	55	98	90	188



Sebaran PNSD lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan menurut pendidikan dan jenis kelamin.

Tabel 2. Sebaran PNSD Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sul-Sel TA. 2021 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	S3	2	2	4
2	S2	28	29	57
3	S1	45	55	100
4	Sarjana Muda	7	1	8
5	SMA	15	2	17
6	SMP	0	1	1
7	SD	1	0	1
	Jumlah	98	90	188

Tabel 3. Data Pejabat Struktural Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sul-Sel TA. 2021

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Total
		Pria	Wanita	
1	Eselon II	-	-	0
2	Eselon III	14	1	15
3	Eselon IV	19	10	29
	Jumlah	33	11	44

1.2. TUGAS POKOK

Tugas Pokok Pejabat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan adalah :

Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah

Sekretaris

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Dinas

Bidang Pengelolaan Dan Penataan Ruang Laut, Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan dan penataan ruang laut, pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perikanan tangkap.

Bidang Perikanan Budidaya dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Bidang Perikanan Budidaya dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan, kebijakan teknis perikanan budidaya dan daya saing produk kelautan dan perikanan.

Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah 1 dan 2

Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan teknis operasional pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan.

UPT Balai Penerapan Mutu Produk Hasil Perikanan

Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan teknis operasional pengujian mutu dan keamanan produk perikanan, diversifikasi produk, dan penerapan persyaratan Standar Nasional Indonesia pada produk hasil perikanan.

UPT Perikanan Budidaya Air Payau Dan Laut

Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan teknis operasional produksi, pelayanan teknologi budidaya ikan air payau/laut, pemantauan kesehatan lingkungan, dan jejaring pemuliaan ikan.

Cabang Dinas Kelautan

Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur berdasarkan wilayah kerja.

Dengan Peraturan Gubernur No.03 Tahun 2018 telah, dibentuk Cabang Dinas Kelautan, masing-masing:

- a. Cabang Dinas Kepulauan Selayar, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Selayar yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Kepulauan Selayar;
- b. Cabang Dinas Pangkajene dan Kepulauan, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Pangkep yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Kepulauan Pangkajene dan Kepulauan;
- c. Cabang Dinas Luwu Raya, Kelas A berkedudukan di Kota Palopo yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Toraja Utara;
- d. Cabang Dinas Ajatappareng, Kelas A berkedudukan di Kota Pare-Pare yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Barru, Kota Pare-Pare, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap, dan Kabupaten Enrekang;
- e. Cabang Dinas Bosowasi, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Bone yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Sinjai;
- f. Cabang Dinas Wilayah Selatan, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Bulukumba yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, dan Kabupaten Bulukumba;

- g. Cabang Dinas Wilayah Mamminasata, Kelas A berkedudukan di Kota Makassar yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar

1.3. FUNGSI

Kepala Dinas

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

Sekretaris

Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas;
- b. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- c. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum;
- d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Bidang Pengelolaan Dan Penataan Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil

Kepala Bidang Pengelolaan dan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Pengelolaan Dan Penataan Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Dan Penataan Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan Dan Penataan Ruang Laut, Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil;
- d. Pelaksanaan administrasi Bidang Pengelolaan Dan Penataan Ruang Laut, Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Bidang Perikanan Budidaya dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Perikanan Budidaya Dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Perikanan Budidaya Dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Perikanan Budidaya dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi Bidang Perikanan Budidaya dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan ; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Bidang Perikanan Tangkap

Kepala Bidang Perikanan Tangkap dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Perikanan Tangkap;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Perikanan Tangkap;
- c. Pelaksanaan dan evaluasi dan pelaporan Bidang Perikanan Tangkap;
- d. Pelaksanaan administrasi Bidang perikanan tangkap
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan ; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah 1 dan 2

Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan teknis pelaksanaan pelayanan pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya ikan, serta keselamatan operasional kapal Perikanan;
- b. pelaksanaan teknis pelayanan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya ikan, serta keselamatan operasional kapal Perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi UPT; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

UPT BALAI PENERAPAN MUTU PRODUK HASIL PERIKANAN

Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan teknis pelaksanaan pelayanan pengujian mutu dan keamanan produk perikanan, diversifikasi produk perikanan, dan penerapan persyaratan Standar Nasional Indonesia pada produk hasil perikanan;
- b. pelaksanaan teknis pelayanan pengujian mutu dan keamanan produk perikanan, diversifikasi produk perikanan, dan pemenuhan persyaratan SNI produk hasil perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan pengujian mutu dan keamanan produk perikanan, diversifikasi produk perikanan, dan pemenuhan persyaratan SNI produk perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi UPT; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

UPT PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT

Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan teknis pelaksanaan pelayanan teknik produksi budidaya ikan air payau/laut, pelayanan teknologi dan jejaring pemuliaan ikan;
- b. pelaksanaan teknis pelayanan teknik produksi budidaya ikan air payau/laut, pelayanan teknologi dan jejaring pemuliaan ikan;
- c. pelaksanaan administrasi UPT; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

CABANG DINAS KELAUTAN

Kepala Cabang Dinas Kelautan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan program sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya, berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur.
- b. Koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur;

- c. Koordinasi dan pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diatas telah ditetapkan target pembangunan kelautan dan perikanan yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK). Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Gubernur sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Capaian Perjanjian kinerja tersebut dituangkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Atas dasar hal-hal di atas tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai Instansi Pemerintah dan Penyelenggara Negara telah menetapkan target kinerja tahun 2020 dilanjutkan dengan melakukan monitoring dan pengukuran kinerja yang telah dicapai, kemudian dituangkan ke dalam susunan Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sul-Sel tahun 2020 sebagai wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban yang mengacu pada Perpres RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviua atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.4. ISU STRATEGIS

Dalam penentuan Isu-Isu Strategis, maka perlu mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan ditinjau dari permasalahan pembangunan daerah yaitu :

1. Produktivitas dan daya saing produksi perikanan masih rendah,
2. Nilai tambah produk olahan dan pemasaran belum optimal dan berdaya saing,
3. Masih lemahnya manajemen pelabuhan perikanan dan TPI sehingga kualitas produksi kurang,

4. Kualitas Kelembagaan Nelayan, Pembudidaya & Pengolah serta Kesenjangan Gender dalam kelembagaan kelompok,
5. Sebagian besar operasional usaha nelayan skala kecil bergantung pada Ponggawa Sawi,
6. Masih maraknya Kegiatan Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) Fishing,
7. Terjadinya konflik kepentingan antar sektor kelautan dan perikanan dengan sektor pertambangan khususnya di wilayah laut dan pesisir serta Padat tangkap (Overfishing) di perairan pantai
8. Kondisi terumbu karang yang persentasinya lebih besar sudah dalam keadaan rusak dan Penurunan kuantitas mangrove akibat adanya eksplorasi besar-besaran.

Tabel 4 : Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Produktivitas dan daya saing produksi kelautan dan perikanan masih rendah	Sarana dan prasarana pendukung masih terbatas	Pengelolaan sumberdaya dan kebutuhan sarana dan prasarana tidak terstruktur
2	Nilai tambah produk olahan dan pemasaran belum optimal dan berdaya saing	Penerapan inovasi dan teknologi pada produk olahan masih terbatas	Penguatan aparatur yang terampil berinovasi dan pembinaan daya saing produk perikanan yang masih rendah
3	Masih lemahnya manajemen pelabuhan perikanan dan TPI sehingga kualitas produksi kurang	Sarana dan prasarana pelabuhan belum Optimal	Pembinaan terhadap nelayan dan petugas pelabuhan belum Optimal

Tabel 4 : Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
4	Kualitas Kelembagaan Nelayan, Pembudidaya & Pengolah serta Kesenjangan Gender dalam kelembagaan kelompok	Kelompok nelayan masih menggunakan sarana prasarana alat tangkap tradisional dan Masih kurangnya Kelompok nelayan dalam bentuk korporasi	Kualitas SDM nelayan sebagian besar masih relatif rendah
5	Sebagian besar operasional usaha nelayan skala kecil bergantung pada Ponggawa Sawi	Kurangnya informasi akses perbankan	Akses untuk permodalan bagi pengembangan usaha perikanan terbatas
6	Masih maraknya Kegiatan Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) Fishing	Kegiatan pengawasan belum optimal	Kurangnya sarana prasarana dan SDM penegak hukum di laut
7	Terjadinya konflik kepentingan antar sektor kelautan dan perikanan dengan sektor pertambangan khususnya di wilayah laut dan pesisir serta Padat tangkap (Overfishing) di perairan pantai	Zona pemanfaatan ruang yang berada di laut dan pesisir belum maksimal dipedomani	Dokumen RZWP3K dan rencana alokasi ruang belum dimanfaatkan
8	Kondisi terumbu karang yang persentasinya lebih besar sudah dalam keadaan rusak dan Penurunan kuantitas mangrove akibat adanya eksplorasi besar-besaran	Degradasi habitat dan ekosistem pesisir dan laut	Kebijakan "limited access" belum diterapkan secara menyeluruh.

Tabel 4 : Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
9	Mekanisme pengumpulan data perikanan masif bersifat masif dan Belum adanya sistem pengelolaan data yang terintegrasi	Sistem data belum terkoordinasi dengan baik	Sistem pendataan dan informasi perikanan yang belum andal dan masih parsial

BAB II **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA**

2.1. PERENCANAAN

Dalam mendukung capaian sasaran disusun program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan secara bersama-sama yang saling terkait dan saling memperkuat satu dengan lainnya. Keberhasilan pelaksanaan satu agenda juga turut menentukan keberhasilan agenda lainnya oleh sebab itu, maka setiap tahun kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan ke dalam Dokumen RKPD sebagai dokumen yang sifatnya lebih operasional. RKPD perubahan 2020 memperhatikan rancangan dokumen Renstra Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan maka dengan menyesuaikan Tema RKP Tahun 2021, yaitu “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”, maka fokus

pembangunan diarahkan kepada: Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi; Reformasi Sistem Kesehatan Nasional; Reformasi Sistem Perlindungan Sosial; Reformasi Sistem Ketahanan Bencana.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2021 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut: Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun Sumber Daya Manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global; Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat; Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 Undang-Undang (pertama Undang-Undang Cipta Kerja dan kedua Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM)); Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka penanganan kondisi ekonomi pasca pandemik Covid-19 dan telah terjadi Refocusing anggaran sehingga program strategis tersebut didukung oleh beberapa program pendorong dalam mendukung kebijakan pemerintah. Sektor kelautan dan perikanan sebagai prime mover dalam pembangunan ekonomi ke depan, dengan mengacu pada RKP Nasional, RKPD

Perubahan Daerah, Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024 dan Renstra Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2021-2023. Arah kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Daerah Tahun 2021 memperhatikan kebijakan untuk penanganan ekonomi pasca Pandemik Covid-19.

Program Prioritas daerah dengan mengacu pada pernyataan Visi pembangunan daerah Sulawesi Selatan yaitu menjadikan :

**“Sulawesi Selatan Yang
Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter”**

Rumusan visi ini mengandung lima pokok visi di dalamnya yakni inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter. Keempat pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2023 dimana terjemahkan provinsi Sulawesi Selatan yang “Bersih dan Melayani”, “Terkoneksi”, “Mandiri dan Sejahtera”, “Sehat dan Cerdas” serta “Berkarakter” dengan penjelasan Visi adalah Inovatif yaitu Kondisi pemerintahan yang memiliki kemampuan men-ciptakan gagasan baru, produk baru, dan layanan baru dalam kerangka kepemerintahan yang baik sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “bersih dan melayani”, Kompetitif yaitu Kondisi masyarakat yang memiliki sumberdaya manusia (SDM) dengan kualitas tinggi sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “sehat dan cerdas”, Produktif yaitu Kondisi perekonomian yang berkemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang berdaya saing sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “mandiri dan sejahtera”, Inklusif yaitu Kondisi penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan partisipasi seluruh unsur masyarakat dan seluruh bagian wilayah serta ramah terhadap lingkungan hidup sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “inklusif dan terkoneksi”. Berkarakter yaitu Kondisi penyelenggaraan pembangunan Sulawesi Selatan yang dilandasi oleh spirit dan nilai-nilai luhur kebudayaan masyarakat sehingga terwujud

Sulawesi Selatan yang “berkarakter”.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka upaya umum yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi sebagai berikut.

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan yang responsif dan inklusif dengan berbasis pada inovasi . Pokok Visi adalah Inovatif dan Inklusif
2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan *Aksesibel*.
Membangun infrastruktur dalam menguatkan inter-koneksivitas antar wilayah pertumbuhan ekonomi dan menjangkau lokasi pelosok dan terisolir. Pokok Visi adalah Produktif dan Inklusif .
3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif Mengembangkan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sesuai keunggulan komparatif wilayah . Pokok Visi adalah Produktif
4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter Memenuhi akses pendidikan berkualitas dan penguasaan ipteks tanpa hambatan bagi seluruh warga,menjamin akses layanan kesehatan ber-kualitas tanpa hambatan bagi seluruh warga, serta mendorong pelestarian dan pemajuan kebudayaan daerah Pokok Visi adalah Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter.
5. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber daya Alam yang Berkelanjutan. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk perekonomian rakyat serta melestarikan lingkungan hidup dan sumberdaya alam. Pokok Visi adalah Kompetitif .

Pelaksanaan Misi dalam mewujudkan visi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan:

Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif

Tujuan : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

Untuk kelancaran dan dukungan operasional kegiatan maka terdapat Program Penunjang untuk mendukung Program Utama yaitu :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Indikator Program :

- a. Persentase realisasi kegiatan perangkat daerah
- b. Persentase ASN perangkat daerah berkinerja kategori baik dan Sangat baik
- c. Persentase penurunan temuan berdasarkan LHP

Misi 5: Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber daya Alam yang Berkelaanjutan

Tujuan : Meningkatkan produksi dan nilai tambah produk perikanan yang berdaya saing

Sasaran :

1. Meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah factor produksi dan produktivitas produksi
2. Meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan
3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan

Didukung oleh program :

Program Prioritas :

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Indikator Program :

- a. Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan Tangkap pada tahun 2021 sebesar Rp. 8.852,48 M menjadi Rp. 9.210,12 M pada tahun 2023
- b. Produksi Perikanan Tangkap pada tahun 2021 sebesar 396.992,3 ton menjadi 413.030,8 ton pada tahun 2023

- c. Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional tahun 2023 sebesar 57,89% menjadi 78,94% pada tahun 2023
- d. Cakupan Bina Kelompok Nelayan pada tahun 2021 sebesar 23,89% menjadi 30,89% pada tahun 2023
- e. Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan pada tahun 2021 sebesar 25,61% menjadi 27,17% pada tahun 2023.

2. Program Perikanan Budidaya :

Indikator Program :

- a. Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan Budidaya tahun 2021 Rp. Rp. 14.474,73 M menjadi Rp. 15.958,39 M tahun 2023
- b. Produksi Perikanan Budidaya tahun 2021 sebesar 3.898.767,4 ton menjadi 4.298.391,1 ton tahun 2023
- c. Persentase ketersediaan benur berkualitas 100% per tahun

3. Program Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Indikator Program :

- a. Produksi garam rakyat tahun 2021 sebesar 46.500 ton menjadi 48.450 ton tahun 2023
- b. Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Perikanan tahun 2021 sebesar 50,17 %% menjadi 100% tahun 2023

4. Program Pengolahan dan Pemasaran Indikator Program :

- a. Nilai Hilirisasi Produk olahan ikan konsumsi dan non konsumsi tahun 2021 sebesar Rp. 304.96 Milyar menjadi Rp. 317,28 Milyar tahun 2023
- b. Produksi olahan ikan konsumsi dan non konsumsi tahun 2021 sebesar 5.329,0 ton menjadi 5.544,1 ton tahun 2023

- c. Persentase pembinaan mutu produk perikanan tahun 2021 sebesar 60% per tahun menjadi 100% tahun 2023

Tujuan : Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berdaya saing tanpa mengabaikan kelestarian dan daya dukung lingkungan hidup

Sasaran : Meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan

Didukung oleh program :

Program Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Indikator Program :

- a. Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan tahun 2021 sebesar 67,29% (674.229,5 Ha) menjadi 67,31% (674.339,5 Ha) tahun 2023
- b. Cakupan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tahun 2021 sebesar 60 % menjadi 100% tahun 2023

Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Indikator Program :

Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku tahun 2021 sebesar 87,48% menjadi 89,85% tahun 2023

2.2. PENETAPAN KINERJA

Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dinas Kelautan dan

Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai komitmen kinerja yang terdiri dari sasaran, indikator dan target tahun 2021.

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
I. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1.	Nilai sakip perangkat daerah (%)	86,01
	2.	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah (%)	98
	3.	Persentase Nilai Temuan Material LHP yang ditindaklanjuti (%)	100
II. Meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah produksi dan produktivitas produksi	4.	Produksi perikanan (ton)	4.342.259,8
	5.	Kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB Perikanan(%)	4,6
III. Meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan	6.	Konsumsi Ikan	59,5
IV. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan	8.	Nilai tukar nelayan (NTN)	102,37
V.Meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan	9.	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial (%)	1,05
	10.	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	35.72
	11.	Persentase penurunan tindakan IUU Fishing	20,83

Program	Anggaran (Rp)
1. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	33.858.376.210
2. PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	14.745.700.677
3. PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	24.908.277.380
4. PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	10.379.225.900

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
5. PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		12.593.872.046
6. PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		1.700.829.096

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dari program dan kegiatan serta indikator makro yang diberlakukan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 sebagai berikut :



Sumber :Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Perhitungan pencapaian indicator sasaran menggunakan asumsi I : jika **semakin tinggi realisasi**, menunjukkan pencapaian kinerja yang **semakin baik** atau sebaliknya **realisasi makin rendah** pencapaian kinerja **semakin rendah/jelek** adalah :

$$\% \text{ pencapaian rencana} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan apabila **semakin tinggi realisasi** menunjukkan pencapaian sasaran kinerja **semakin rendah/jelek**, atau sebaliknya **realisasi semakin rendah** pencapaian kinerja **semakin baik** menggunakan rumus :

$$\% \text{ pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{(2x\text{rencana}) - \text{realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

3.1. CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS/ IKU

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2021.

Hasil pengukuran capaian sasaran yang telah ditetapkan dengan melihat tingkat capaian kinerja masing-masing indicator kinerja tersebut diuraikan pada tabel berikut :

*Tabel 6. Capaian Kinerja Sasaran Sasaran Startegis /IKU
Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI*	CAPAIAN
I. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1.	Nilai sakip perangkat daerah (%)	86,01	85,78*	99,73
	2.	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah (%)	98	109,07	111,29
	3.	Persentase Nilai Temuan Material LHP yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100

II. Meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah produksi dan produktivitas produksi	4.	Produksi perikanan (ton)	4.342.259,8	4.500.184,6	103,64
	5.	Kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB Perikanan(%)	4,6	9,4	204,35
III. Meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan	6.	Konsumsi Ikan	59,5	68,3	114,79
IV. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan	7.	Nilai tukar nelayan (NTN)	102,37	107,43	104,94
V.Meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan	8.	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial (%)	1,05	1,57	149,52
	9.	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	35.72	56.12	157.11
	10 .	Persentase penurunan tindakan IUU Fishing	20,83	83.33	50,01

Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang dilaksanakan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 7. Predikat Capaian Kinerja Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

No	Sasaran	Jumlah		Rata-Rata Capaian	Predikat

		Indikator	≤ 50	$50,1 \leq 65$	$65,1 \leq 75$	$75,1 \leq 90$	$90,1 \geq$	
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	3					102,93	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah produksi dan produktivitas produksi	2					154,0	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan	1					104.94	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan	1					114.79	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan	3					118,88	Sangat Tinggi

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Untuk memberikan informasi yang lebih transparan maka hasil pengukuran capaian kinerja selanjutnya dievaluasi dan dianalisis untuk mengetahui faktor-

faktor penyebab target yang ditetapkan dapat tercapai atau tidak tercapai. Pelaksanaan program/kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2021 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan, maka untuk mengevaluasi sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Penjelasan prestasi kinerja pembangunan kelautan dan perikanan sepanjang tahun 2021 sebagaimana berikut.



Terdapat 3 indikator dalam mendukung sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan, dan pengelolaan keuangan perangkat daerah yaitu (1) nilai SAKIP OPD, (2) persentase capaian kinerja program perangkat daerah dan (3) persentase nilai temuan material LHP yang ditindaklanjuti.

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja sasaran I

Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja Sasaran I

Indikator Kinerja Sasaran	2021		
	Target	Realisasi*	Capaian (%)

Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja Sasaran I

Nilai sakip OPD	86,01	85.78*	99.73*
Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	98	109.07	111.29
Persentase Nilai Temuan Material LHP yang ditindaklanjuti	100	100	100

*data sementara

Realisasi Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2021 sebesar 85,78 (*data sementara*) atau mencapai target sebesar 99,73 %. Realisasi persentase capaian kinerja program perangkat daerah tahun 2021 sebesar 109,07 % atau mencapai target sebesar 111,29 %. Realisasi persentase nilai temuan material LHP yang ditindaklanjuti tahun 2021 sebesar 100 % atau mencapai 100 % dari target.

b. Perbandingan antara realiasi kinerja sasaran dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah (RPJMD)

Tabel 9. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran I tahun 2019-2021 dan capaian terhadap target akhir RPJMD

Indikator Kinerja Sasaran	2019	2020	2021	Target Akhir RPJMD 2023	Capaian 2021 terhadap 2023 (%)
Nilai sakip OPD	85,61	85,78	85,78*	86,41	99,27
Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	94,00	82,34	109.07	95	114,81
Persentase Nilai temuan material LHP yang ditindak lanjuti	100	100	100	100	100

*data sementara

Realisasi Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 85,78 (*data sementara*) . pada tahun 2020 nilai SAKIP naik 0,19 % sebesar 85,78 % dari nilai SAKIP tahun 2019 sebesar 85,61 %. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Realisasi Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 mencapai 99,07 %.

Realisasi persentase capaian kinerja program perangkat daerah tahun 2021 sebesar 109,07 %. Realisasi persentase capaian kinerja Dinas Kelautan dan perikanan tahun 2021 naik 24,51 % dibandingkan capaian tahun 2020 sebesar 82,34 %. Realisasi persentase nilai temuan material LHP yang ditindaklanjuti tahun 2021 mencapai 100 %.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja sasaran I serta alternative solusi yang telah dilakukan

INDIKATOR I.1	NILAI SAKIP OPD
---------------	-----------------

Realisasi Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2021 sebesar 85,78 (*data sementara*) atau mencapai target 99,73 % dan naik sebesar % dari nilai SAKIP tahun 2020. Nilai SAKIP DKP provinsi Sulawesi Selatan selama 4 tahun berturut-turut mendapat predikat A (memuaskan), hal ini menunjukkan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menuangkan program telah selaras dan mengacu pada visi dan misi pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD serta mampu meningkatkan pencapaian kinerja program dan kegiatan.

Tabel 10. Hasil Evaluasi AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2020

Komponen yang dinilai	Bobot (%)	2017	2018	2019	2020	2021	Naik/turun tahun 2020 - 2021
Pernencanaan Kinerja	30	25,13	28,35	28,05	27,89		
Pengukuran Kinerja	25	19,69	19,69	20,31	20,63		
Pelaporan Kinerja	15	13,83	13,83	13,83	12,49		
Evaluasi Internal	20	7,18	7,18	6,95	7,08		
Pencapaian Kinerja	10	14,98	15,54	16,47	17,69		
Jumlah	100	80,82	84,59	85,61	85,78		
Kategori		A	A	A	A		

Jika dilihat dari nilai komponen, pada tahun 2020 terjadi penurunan pada komponen/sub komponen diantaranya :

- Komponen Perencanaan Kinerja yaitu dari nilai 28,05 menjadi 27,89
- Komponen pelaporan kinerja yaitu dari nilai 13,83 menjadi 12,49

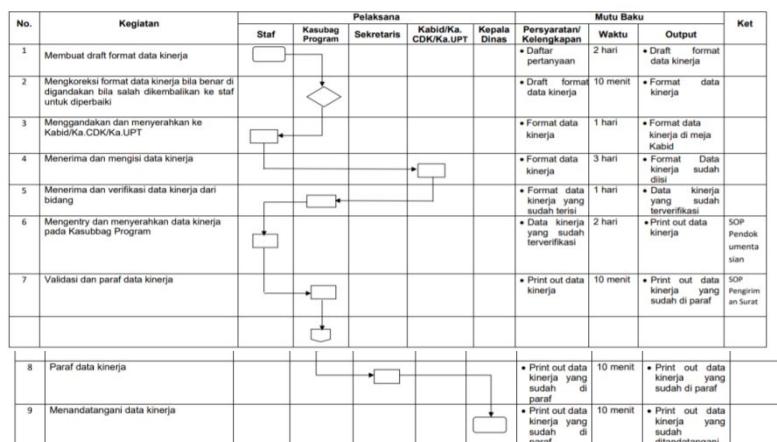
Hal yang perlu menjadi perhatian dari rekomendasi Tim Evaluator dan untuk dilakukan perbaikan adalah :

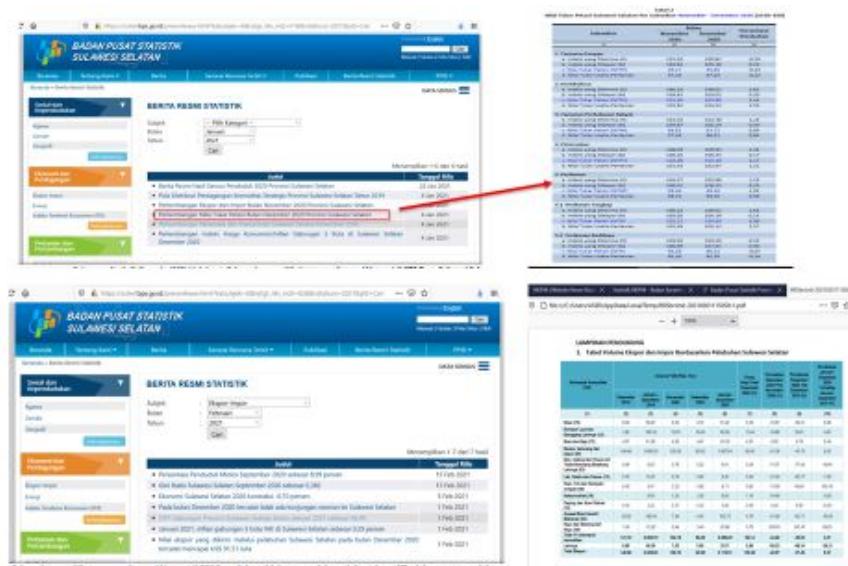
- a. Menyelaraskan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan berdasarkan perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023
- b. Pengumpulan data kinerja perlu menyajikan informasi capaian kinerja berdasarkan fakta sebenarnya atau bukti yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu data yang dikumpulkan berdasarkan suatu mekanisme yang memadai atau terstruktur (jelas mekanisme pengumpulan datanya, siapa yang mengumpulkan data, mencatat, dan siapa yang mensupervisi dari sumberdata yang up to date /valid)

- c. Dalam laporan kinerja perlu menyajikan informasi terkait informasi dan upaya efisiensi yang telah dilakukan.
- d. Perlu dilakukan pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya meliputi pengidentifikasi, pencatatan, observasi lapangan, serta pengadministrasina kemajuan (progres) sebagai bahan laporan kepada pimpinan.
- e. Perlu disusun laporan triwulan atas rencana aksi yang telah ditetapkan yang didalamnya memuat permasalahan, capaian output serta upaya perbaikan yang dilakukan.
- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala sebagai bahan dalam rangka optimalisasi terhadap pencapaian target kinerja dan output kegiatan.

Berdasarkan rekomendasi tersebut diatas telah dilakukan perbaikan yaitu :

- a. **Telah diselaraskan** indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan berdasarkan perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023.
- b. Pengumpulan data **dilakukan berdasarkan SOP pengumpulan data** sebagaimana gambar berikut .





Data kinerja yang bersumber dari instansi luar seperti BPS diperoleh melalui website resmi

c. Telah

diperbaiki Laporan kinerja telah menyajikan informasi terkait informasi dan upaya efisiensi yang telah dilakukan.

d. Telah dilakukan Pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja yang dilakukan tiap bulan dengan meminta laporan monev tiap bulan kepada unit kerja dan dilakuakna pertemuan monev

➤ Pemantauan dilakukan tiap bulan dengan rekap laporan monev unit kerja



Hasil Rekap Monev progress Fisik & Keuangan



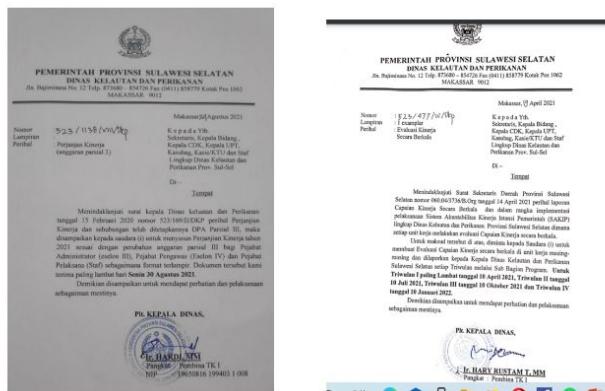
Pertemuan monev dijadwalkan tiap bulan namun karena kondisi pandemi sehingga beberapa bulan pertemuan monev tidak dilaksanakan

- e. **Telah disusun** laporan triwulan atas rencana aksi yang telah ditetapkan yang didalamnya memuat permasalahan, capaian output serta upaya perbaikan yang dilakukan.
- f. **Telah dilakukan** pemantauan dan evaluasi secara berkala sebagai bahan dalam rangka optimalisasi terhadap pencapaian target kinerja dan output kegiatan sebagaimana dijelaskan pada point d tindak lanjut. Selain itu unit kerja melaksanakan evalausi secara berkala terhadap PK Eselon III dan IV.



pemantauan mengenai evaluasi kemajuan pencapaian kinerja program beserta hambatannya dilaksanakan dengan mengundang unit kerja lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta Dinas Perikanan Kabupaten Kota sebagai salah satu bahan perencanaan program kegiatan tahun berikutnya

Penyusunan PK dan Evaluasi Kinerja Secara Berkala



Setiap unit kerja melakukan pemantau secara berkala terhadap target output kegiatan dan outcome program sesuai dengan Perjanjian Kinerja

INDIKATOR 1.2	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH
---------------	---

Realisasi persentase capaian kinerja program perangkat daerah Dinas Kelautan dan perikanan tahun 2021 sebesar 109,07 % atau mencapai target sebesar 111,29 % dan naik 24,51 % dibandingkan tahun 2020 . Bila dibandingkan dengan

target akhir RPJMD yang akan dicapai pada tahun 2023 maka dicapai 114,81 % dari target RPJMD.

Tabel 11. Persentase Capaian Kinerja Program tahun 2021

PROGRAM	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021 (%)
1. Program Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Produksi garam rakyat 46.500 ton	1.283,15 ton	2,76
	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Perikanan 50,17 %	28,28%	56,37
	Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan 67,29 %	67,29 %	100
	Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional 57,89 %	52,63 %	90,92
	Nilai Produksi Perikanan Tangkap Rp 8.852,48 M	Rp 10.679,87 M	120,64
	Produksi perikanan tangkap 396.992,3 ton	417.410,7 ton	105,14
	Cakupan Bina Kelompok Nelayan 23,89 %	18,47 %	77,31
	Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan 25,61 %	18,11 %	70,71
	Nilai produksi perikanan budidaya Rp 14.474,7 M	Rp 15.878,28 M	109,7
	Produksi perikanan budidaya 3.898.767,4 ton	4.081.480,5 ton	104,69
	Persentase ketersediaan benur berkualitas 100 %	96,90 %	96,90

PROGRAM	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021 (%)
Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Percentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundungan yang berlaku 87,48 %	69,18 %	79,08
Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Produksi olahan konsumsi dan non konsumsi 5.329 ton Percentase Pembinaan mutu produk perikanan 60 %	6.064,47 ton 54,08 %	113,80 90,13
Penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Nilai Hilirisasi Produksi olahan Ikan konsumsi dan non konsumsi Rp 304,96 M Percentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah 100 % Percentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik 100 % Percentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP 8,7 %	Rp 353,57 M 95,43 % 99,46% 37,78 %	115,94 95,43 99,46 434,23
RATA-RATA CAPAIAN PROGRAM =			109,07

Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah sebesar 109,07 % kategori Sangat Tinggi disebabkan adanya indikator kinerja proram yang melampaui target diantaranya adalah indikator Percentase penurunan temuan berdasarkan LHP (%) ditargetkan 8,7 % terealisasi 37,78 % sehingga capaian mencapai target sebesar 434,23 %. Jumlah temuan tahun 2020 adalah 45 sedangkan jumlah temuan tahun 2021 turun 37,78 % sebanyak 28 temuan.

INDIKATOR 1.3	PERSENTASE NILAI TEMUAN MATERIAL LHP YANG DITINDAK LANJUTI
---------------	--

Realisasi persentase nilai temuan material LHP yang ditindaklanjuti tahun 2020 terealisasi sebesar 100 % atau mencapai target sebesar 100 % dari target 100

%. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD yang akan dicapai pada tahun 2023 maka telah dicapai 100 % dari target. Jumlah temuan tahun 2019 – 2021 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 12. Persentase nilai temuan material LHP yang ditindaklanjuti

Tahun	Jumlah Temuan	Dalam proses	Sudah selesai
2019	28	-	28
2020	45	-	45
2021	28	6*	22**

Catatan :

*) Kondisi bulan Juli s/d Desember 2021

*) Kondisi per 15 Juni 2021

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya sasaran I

Tabel 13. Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya Sasaran I

Sasaran	Indikator	Capaian (%)	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persen Realisasi anggaran	Efisiensi
1	3	4	2	5	6	7	8= 4 - 7
Sasaran I : Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Nilai sakip perangkat daerah	99.73	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33,858,376,210	33,125,474,613	97,84	5.10 (Efisien)
	Percentase capaian kinerja program perangkat daerah (%)	109.07					
	Percentase nilai temuan material LHP yang ditindaklanjuti (%)	100					
Rata-rata capaian kinerja		102.93				97.84	

Dari hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dapat dikatakan bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran I dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang efisien, karena persentase capaian kinerja sasaran menunjukkan persentase keberhasilan yang lebih tinggi daripada persentase realisasi penggunaan anggaran. Hal ini disebabkan karena adanya salah satu **capaian indikator sasaran**

yang capaiannya kategori tinggi diatas 100 % yaitu persentase capaian kinerja program perangkat daerah sehingga Sasaran I memenuhi kategori point a dibawah. Hal ini sesuai dengan materi yang disampaikan pada acara FGD Evaluasi kinerja anggaran tahun 2021 dan peningkatan kinerja anggaran satker lingkup KKP 16 Maret 2022 oleh Subdit Teknologi Informasi penganggaran Kementerian Keuangan bahwa **Yang mempengaruhi efisiensi adalah :**

- capaian indikator sasaran
- Penyerapan anggaran

Untuk memperoleh efisiensi yang optimal :

- a. Capaian indikator sasaran **diatas target** dengan penyerapan anggaran **sesuai** pagu yang dialokasikan.
- b. Capaian indikator sasaran **diatas target** dengan penyerapan anggaran **kurang** dari pagu yang dialokasikan.
- c. Capaian indikator sasaran **sesuai target** dengan penyerapan anggaran **kurang** dari pagu yang dialokasikan
- e. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sasaran I**

Sasaran meningkatnya meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah dapat dicapai melalui program :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari beberapa kegiatan danttaranya yaitu :

❖ **Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan :**

- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah target output jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun 15 dokumen.
- Koordinasi dan penyusunan dokumen RKASKPD target jumlah dokumen RKA SKPD yang tersusun dan terkoordinasi 48 dokumen.
- Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKASKPD target jumlah dokumen perubahan RKA SKPD yang tersusun sebanyak 30 dokumen.
- Koordinasi dan penyusunan DPASKPD target output jumlah dokumen DPA SKPD yang tersusun dan terkoordinasi sebanyak 30 dokumen
- Koordinasi dan penyusunan perubahan DPASKPD target output jumlah dokumen perubahan DPA SKPD yang tersusun dan terkoordinasi sebanyak 30 dokumen
- Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan target jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun dan terkoordinasi 10 dokumen, jumlah data dan informasi 2 laporan , jumlah data yang dipublikasikan 6 jenis.
- Evaluasi kinerja perangkat daerah dengan target output jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 7 dokumen.

❖ Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah terdiri dari sub kegiatan :

- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN target output jumlah laporan gaji dan tunjangan ASN yang terkoordinasi tepat waktu sebanyak 12 laporan

- Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD dengan target output jumlah laporan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang dilaksanakan 12 laporan
- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD target output jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD sebanyak 1 laporan
- Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan target jumlah laporan bahan tanggapan pemeriksaan yang disiapkan dan dikelola 1 laporan
- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan triwulan sesmesteran target jumlah laporan sebanyak 18 laporan.

❖ Administrasi kepegawaian perangkat daerah terdiri dari sub kegiatan :

- Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian target jumlah laporan pendataan administrasi kepegawaian yang dikelola sebanyak 12 laporan
- Koordinasi dan pelaksanaan system informasi kepegawaian target jumlah laporan dan system informasi kepegawaian yang telah dikoordinasi sebanyak 12 laporan
- Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai target jumlah laporan monitoring evalausi dan penilaian kinerja pegawai sebanyak 12 laporan.

❖ Administrasi umum perangkat daerah terdiri dari sub kegiatan :

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor target jumlah peralatan kantor yang tersedia sebanyak 17 jenis dan jumlah perlengkapan kantor yang tersedia sebanyak 20 jenis
- Penyediaan peralatan rumah tangga target output jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia sebanyak 9 unit
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan target jumlah penggandaan yang tersedia sebanyak 19.780 lembar dan jenis cetakan yaitu sebanyak 7 jenis
- Fasilitasi kunjungan tamu target jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi sebanyak 1.051 orang
- Penyelenggaraan peserta rapat koordinasi dan konsultasi SKPD target jumlah peserta rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dihadiri sebanyak 266 orang.

❖ Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah terdiri dari sub kegiatan :

- Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik target jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang telah tersedia 12 bulan.
- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor target jumlah jasa pelayanan umum kantor 147 orang.

❖ Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terdiri dari sub kegiatan :

- Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan target jumlah kendaraan

perorangan dinas tau kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan bebas pajak 40 unit

- Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan target jumlah kendaraan dinas operasional atau kendaraan lapangan yang terpelihara dan bebas pajak sebanyak 3 unit
- Pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya target jumlah gedung yang terpelihara /direhabilitasi 10 unit.

Secara lengkap data target dan capaian output serta perbandingannya dengan tahun lalu dapat dilihat pada tabel halaman lampiran.

f. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program /kegiatan yang mendukungan pencapaian sasaran diantaranya adalah

- Terdapat beberapa item penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor tidak terealisasi karena spek barang sudah tidak ada di pasaran dan harga SSH yang tidak sesuai dengan harga pasar

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah :

- Lebih cermat dalam penyusunan kebutuhan barang dan akan mengajukan SSH sesuai dengan harga dan ketersediaan barang di lapangan.



Keberhasilan capaian sasaran strategis meningkatnya produksi dan kontribusi sektor perikanan diukur dengan 2 indikator yaitu : (1) produksi perikanan, (2) kontribusi PDRB perikanan.

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja sasaran II

Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja Sasaran II

Indikator Kinerja Sasaran	2021		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
Produksi Perikanan (Ton)	4.342.259,8	4.500.174,4	103,64
Kontribusi PDRB Perikanan (%)	4,6	9,40	204,35

Realisasi Produksi perikanan tahun 2021 mencapai target sebesar 103,64 % dan realisasi kontribusi PDRB sub sektor perikanan terealisasi sebesar 9,4% atau mencapai target sebesar 204,35 % dari target 4,6 %.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah (RPJMD)

Tabel 15. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran II tahun 2019-2021 dan capaian terhadap target akhir RPJMD

Indikator Kinerja Sasaran	2017	2018	2019	2020	2021	Target Akhir RPJMD 2023	Capaian 2019 terhadap 2023 (%)
Produksi Perikanan (Ton)	4.301.813,40	4.022.206	4.201.665,51	4.147.630,5	4.500.174,4	4.759.871,9	94,54
Kontribusi PDRB Perikanan (%)	8,3	8,4	8,4	8,5	9,4	5,6	167,85

Realisasi produksi perikanan naik 8,5 % dibandingkan tahun 2020 dan selama kurun waktu 5 tahun terakhir produksi perikanan mengalami peningkatan dengan peningkatan rata-rata 3,48 %. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka produksi perikanan telah mencapai 94,54 %.

Realisasi kontribusi PDRB Perikanan naik 10,59 % dibandingkan tahun 2020 dan selama kurun waktu 5 tahun terakhir kontribusi PDRB Perikanan dengan peningkatan rata-rata 3,6 %. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah dicapai 167,85 % dari target yang ditetapkan pada tahun 2023.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja sasaran II serta alternative solusi yang telah dilakukan

INDIKATOR 2.1	PRODUKSI PERIKANAN
---------------	--------------------

Produksi perikanan

Data produksi perikanan diperoleh dengan rumus :

$$\text{ProduksiPerikanan} = \text{Prod.Kab/Kota I} + \text{Prod.Kab/Kota II} + \text{Prod.Kab/Kota III} + \dots \text{dst}$$

$$X_{\text{tot}} = X_1 + X_2 + X_3 + \dots$$

Produksi perikanan mencapai target sebesar 103,64 % dan naik 8.5 % dibandingkan tahun 2020. Selama kurun waktu 5 tahun yakni dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 produksi perikanan tumbuh positif dengan peningkatan rata-rata 3.48 %. Produksi perikanan terdiri dari produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya dan produksi garam sebagaimana ditunjukkan tabel 16.

Tabel 16. Realisasi produksi perikanan tangkap , produksi budidaya dan produksi garam tahun 2017 – 2021

Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021	Naik /turun tahun sebelumnya
Volume produksi perikanan tangkap (ton)	359.770,1	366.540,7	398.565,2	389.208,2	417.410,7	+ 7.25 %
Volume produksi perikanan budidaya (ton)	3.902.783,4	3.568.952,6	3.662.761,4	3.713.111,8	4.081.480,5	+ 9.92 %
Volume produksi	39.259,90	86.712,70	140.338,87	45.310,5	1.283,15	- 97,15 %

Tabel 16. Realisasi produksi perikanan tangkap , produksi budidaya dan produksi garam tahun 2017 – 2021

Garam						
Total Produksi	4.301.813,40	4.022.206	4.201.665,51	4.147.630,5	4.500.174,4	+ 8.50 %

Peningkatan produksi perikanan disebabkan peningkatan produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya sedangkan produksi garam mengalami penurunan yang signifikan.

Produksi Perikanan Tangkap

**Tabel 17. Produksi Perikanan Tangkap
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021**

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	Target 2021	Realisasi 2021
Produksi perikanan tangkap (ton)	359.770,1	366.540,6	398.565,3	389.208,2	396.992,3	417.410,7

Sumber : Dinas Kelautan dan Pekanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

Produksi perikanan tangkap terealisasi sebesar 417.410,7 ton atau mencapai target sebesar 105,14 % dan naik 7.25 % dibandingkan tahun 2020. Strukturisasi armada tangkap nelayan berupa kapal , mesin, alat tangkap serta alat bantu tangkap diharapkan dapat meningkatkan produktivitas nelayan untuk meningkatkan hasil tangkapan. Selama 5 tahun terakhir jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan dengan jenis bantuan sarana dan prasarana alat tangkap sesuai permohonan proposal yang diajukan oleh kelompok. Berikut data cakupan bina kelompok nelayan selama 5 tahun terakhir.

Tabel 18. Cakupan Bina Kelompok Nelayan tahun 2017 – 2021

Indikator	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	Target 2021	capaian
Jumlah Kelompok Nelayan yang Mendapatkan Bantuan Pemda Tahun n (kelompok)	78	50	55	21	60	75	80 %
Jumlah Kelompok Nelayan (kelompok)	308	311	314	314	314	314	
Cakupan Bina KelompokNelayan (%)	25,32	16,08	17,52	6,68	18,47	23,89	77,31 %

Cakupan bina kelompok nelayan terealisasi sebesar 18,47 % atau mencapai 77,31 % dari target 23,89 %. Hal ini disebabkan tahun 2021 terealisasi 60 kelompok dari target 75 kelompok. Faktor penghambat capaian kinerja adalah dari target 75 kelompok penerima bantuan hanya terealisasi 60 kelompok karena persyaratan teknis bantuan tidak dapat dipenuhi oleh kelompok yang diusulkan. Bantuan sarana prasarana Pemda terdiri dari bantuan kapal 5 GT , 15 GT, 20 GT dan 30 GT, bantuan mesin kapal, alat tangkap dan alat bantu tangkap.

Produksi Perikanan Budidaya

**Tabel 19. Produksi Perikanan Budidaya
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2021**

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	Target 2021	Realisasi 2021

Produksi perikanan Budidaya (ton)	3.902.783,4	3.568.952,3	3.662.761,4	3.713.111,3	3.898.767,4	4.081.480,5
-----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Produksi perikanan budidaya tahun 2021 terealisasi 4.081.480,5 ton atau mencapai 104.69 % dari target dan naik sebesar 9.92 % dibandingkan tahun 2020.

Peningkatan produksi budidaya didukung peningkatan komoditi unggulan budidaya seperti rumput laut dan udang khususnya udang windu sebagaimana terlihat pada tabel 21 berikut .

Tabel 20. Perkembangan produksi rumput laut per kab/kota tahun 2018 -2021

KOMODITI	Realisasi tahun-					naik/ (turun) tahun sebelumnya
	2017	2018	2019	2020	2021	
RUMPUT LAUT	3.671.538.80	3.317.524.90	3.406.924.6	3.441.138,7	3.786.411,7	+ 10.03
UDANG	41.686,0	46.524,0	44.520,5	50.876,1	54.974,6	+ 8.06
UDANG WINDU	12.046,2	10.169,5	10.370,2	10.595,4	11.457,5	+ 8.14

Rumput Laut

Produksi rumput laut naik sebesar 10.03% dibandingkan produksi rumput laut di tahun 2020. Faktor pendorong pencapaian target adalah dilaksanakannya bantuan sarana prasarana budidaya rumput laut untuk meningkatkan produktivitas pembudidaya. Tahun 2021 jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan sarana prasarana budidaya rumput laut adalah sebanyak 52 kelompok dengan jumlah paket bantuan sebanyak 502 paket. Selain itu, peningkatan produksi rumput laut didukung oleh antusiasme pembudidaya karena harga rumput laut yang tinggi berkisar di harga Rp 20.000 – Rp 30.000 per kilogram.

Tahun 2019 dan tahun 2020 Sulawesi Selatan merupakan Penghasil rumput laut terbesar nomor 1 nasional . Produksi rumputlaut per kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 21. Perkembangan produksi rumput laut per kab/kota tahun 2018 -2021

NO	Kabupaten	RUMPUT LAUT			
		Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2018
1	Luwu	614.258,4	612.532,2	604.420,76	598.037,33
2	Luwu Utara	221.207,8	213.848,7	206.618,48	196.988,64
3	Wajo	479.632,2	476.078,9	476.055,25	462.474,73
4	Bone	337.592,2	286.767,2	291.686,60	275.627
5	Sinjai	47.823,8	45.976,4	47.733,99	40.775,81
6	Bulukumba	221.980,9	192.250,4	177.351,10	178.848,4
7	Selayar	359,1	642,1	395,74	365,5
8	Bantaeng	86.313	66.419,0	84.805,21	84.076.788
9	Jeneponto	253.389,9	231.754,4	165.036,22	193.517,76
10	Takalar	587.061	409.117,3	466.014.05	538.680.37
11	Maros	12.870	12.360,5	12.475.00	13.240,8
12	Pangkep	450.011	420.952,0	445.608.00	314.201,3
13	Baru	667,7	680	1.114.00	959
14	Pinrang	19.399,1	14.243,7	16.266.30	15.448,8
15	Gowa	20	-	-	-
15	Luwu Timur	296.267,1	298.712,0	299.067.50	294.897
16	Palopo	157.558,4	123.732,4	112.276.43	109.385.91
TOTAL		3.786.411,7	3.441.138,7	3.406.924,64	3.317.525,14

Udang dan Udang Windu

Untuk komoditi unggulan udang mengalami kenaikan 8.06 % dari tahun sebelumnya. Khusus untuk udang windu terjadi peningkatan produksi sebesar 8.14 % di tahun 2021. Pengembangan udang windu dilaksanakan melalui kegiatan Diseminasi Inovasi Teknologi Udang Windu Berbasis Kawasan yang dilaksanakan di 20 (dua puluh) kecamatan pada 13 (sepuluh) kabupaten yakni Kabupaten Maros, Pangkep, Pinrang, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Takalar, Jeneponto, Bulukumba, Kab. Bone Kab. Barru, Kab. Wajo dan Kota Makassar.

Tabel 22. Laporan Pelaksanaan dan Produksi Kegiatan Desiminasi Udang Windu Tahun 2021

No	Kabupaten/ Kecamatan /Desa	Sarana dan Prasarana	Penyerahan Benih	Pentokolan ke Pembesaran	Jumlah ekor Pembesaran	Produksi (kg)	Ket
1	Maros						
	1. Kec. Bontoa Desa Pajukukang	19 April 2021	22 Juni 2021	7 Juli 2021	92.400	627.0	Selesai
	2. Kec. Marusu Desa Nisombalia	19 April 2021	22 Juni 2021	7 Juli 2021	209,000	1,020.0	selesai
2	Pangkep						
	1. Kec. Pangkajene Desa Sibatua	5 April 2021	09 Mei 2021	29 Mei 2021	139,000	206.7	Selesai
	2. Kec. Pangkajene Kel. Tekolabbua	5 April 2021	09 Mei 2021	29 Mei 2021	68,000	27.0	Selesai
3	Barru						
	1. Kec. Taneterilau Desa Corawali	8 Agus 2021	8-Sep-21	28-Sep-21	120,000		gagal
	2. Kec. Barru Kel. Coppo	8 Agus 2021	1-Sep-21	22-Sep-21	225,000		gagal
4	Pinrang						
	1. Kec. Mattiro Sompe Kel. Langnga	29 April 2021	30 Agus 2021	13-Sep-21	173,800	482.0	Selesai
	2. Kec. Daumpanua Desa Bababinanga	29 April 2021	8 Juni 2021	19 Juni 2021	205,000	285.1	Selesai
5	Bone						
	1. Kec. Sibulue Desa Mabbiring	10 April 2021	11 Mei 2021	11 Juni 2021	3,921		Gagal
	2. Kec. Sibulue Desa Sumpang Minangae	10 April 2021	11 Mei 2021	11 Juni 2021	112,5	138.5	Selesai
6	Wajo						
	1. Kec. Keera Desa Inrello	29 April 2021	24 Mei 2021	25 Juni 2021	35,000	121.0	Selesai
	2. Kec. Keera Desa Paojepe	29 April 2021	24 Mei 2021	25 Juni 2021	25,000	205.0	Selesai
7	Luwu						

**Tabel 22. Laporan Pelaksanaan dan Produksi
Kegiatan Desiminasi Udang Windu Tahun 2021**

N o	Kabupaten/ Kecamatan /Desa	Sarana dan Prasarana	Penyerahan Benih	Pentokolan ke Pembesaran	Jumlah ekor Pembesaran	Produksi (kg)	Ket
	1. Kec. Ponrang Desa Maladimeng	29 April 2021	23 Juni 2021	15 Juli 2021	195,000	380.0	selesai
	2. Kec. Suli Desa Cimpu	29 April 2021	23 Juni 2021	17 Juli 2021	182,000	196.0	Selesai
8	Luwu Utara						
	1. Kec. Bone-Bone Desa Batang Tongka	27 April 2021	23 Juni 2021			225.0	Selesai
	2. Kec. Bone-bone Desa Sadar	27 April 2021	23 Juni 2021				Gagal
9	Luwu Timur						
	1. Kec. Burau Desa Burau Pantai	27 April 2021	24 Juni 2021	27 Juli 2021	93,000	380.0	Selesai
	2. Kec. Angkona Desa Watangpanua	27 April 2021	24 Juni 2021	28 Juli 2021	1,000	148.0	Selesai
10	Makassar						
	1. Kec. Tamalanrea Kel. Tamalanrea Indah	29 April 2021	22 Juni 2021	27 Juli 2021	73,000	900.0	Selesai
	2. Kec. Tamalanrea Kel. Parangloe	29 April 2021	31 Agust 2021	1-Oct-21	85.000	300.0	Selesai
11	Takalar						
	1. Kec. Sanrobone Desa Banyuanyara	29 Agustus 2021	16 Mei 2021	06 Juni 2021	150,000	185.0	Selesai
	2. Kec. Mappakasunggu Desa Takalar	29 Agustus 2021	16 Mei 2021	13 Juni 2021	100,000	190.0	Selesai
12	Jeneponto						
	1. Kec. Bangkala Barat Desa Tuju	7 April 2021	7-Apr-21	27-Apr-21	50,000	835.0	Selesai
	2. Kec. Bangkala Barat Desa Banrimanurung	7 April 2021	16 Mei 2021	03 Juli 2021	80,100	912.0	Selesai
13	Bulukumba						
	1. Kec. Ujung Loe Desa Manyampa	23 Juni 2021	6-Sep-21	27-Sep-21	187,500	23.0	Selesai
	2. Kec. Kajang Desa Possi Tanah	23 Juni 2021	6-Sep-21		40,000	25.0	Selesai
	TOTAL					2.130.723	7.811 kg

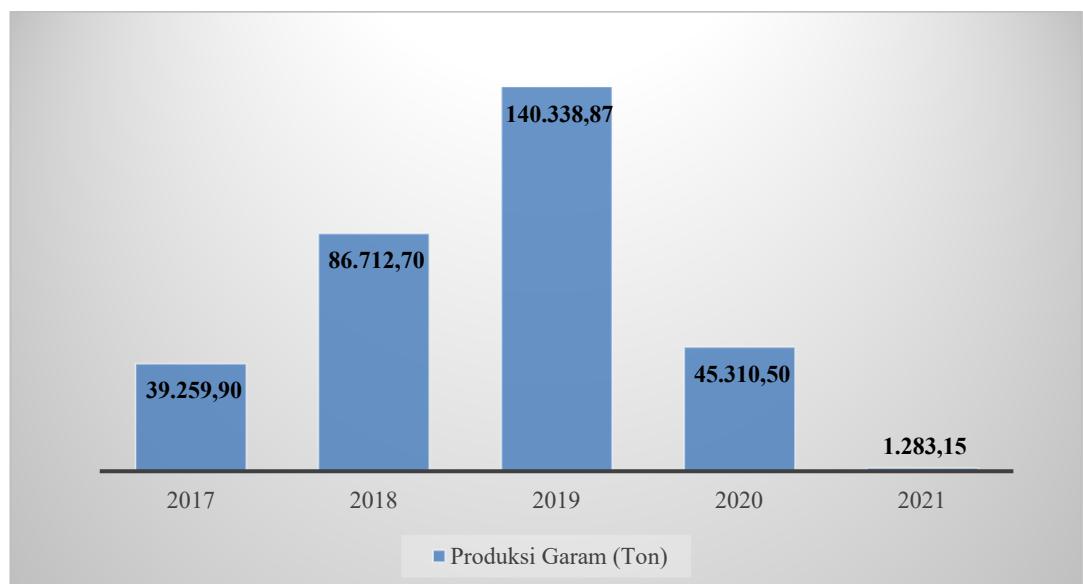
Pada tahun 2019 hasil produksi kegiatan Diseminasi sebanyak 11,2 ton, tahun 2020 hasil produksi kegiatan Diseminasi 12,5 ton, sedangkan di tahun 2021 hasil produksi kegiatan desiminasi menghasilkan 7.8 ton. Hal ini disebabkan karena adanya anomali iklim yang sangat ekstrim. Hujan terjadi dimana-mana

mengakibatkan hampir semua lokasi Diseminasi yang ada di 13 Kabupaten/Kota mengalami banjir. Pada tahun 2019 dan tahun 2020 Sulawesi Selatan Penghasil udang urutan ke 7 nasional.

Tabel 22. Perkembangan produksi udang windu kab/kota tahun 2018 -2021

NO	KABUPATEN	PRDOKSI UDANG WINDU TAHUN – n			
		2021	2020	2019	2018
1	Luwu	424,8	436,8	488,0	515,1
2	Luwu Utara	574,4	526,2	568,1	510,3
3	Wajo	146,1	97,1	96,3	94,8
4	Bone	1.887,3	897,8	877,2	843,2
5	Sinjai	16,4	62,0	63,5	8,1
6	Bulukumba	581	499,1	554,6	657,9
7	Selayar	9,8	9,6	9,1	7,8
8	Bantaeng	7,1	7,2	7,4	5,9
9	Jeneponto	293,6	316,9	407,0	406,5
10	Takalar	206,3	218,4	217,2	312,0
11	Makassar	199,1	319,7	367,0	272,6
12	Maros	1.857,4	1.820,5	1.772,6	1.749,5
13	Pangkep	1.261,7	1.046,0	1.129,0	1.183,0
14	Barru	99,6	100	122,0	120,0
15	Pare-Pare	-	-	-	-
16	Pinrang	3.312,7	3.621,9	3.057,4	2.874,6
17	Gowa	24	48,5	69,4	71,6
18	Luwu Timur	549,3	560,5	556,7	529,0
19	Palopo	7,1	7,2	7,9	7,5
TOTAL		11.457,5	10.595,4	10.595,4	10.169,5

Produksi Garam



Realisasi produksi garam sebesar 1.283,15 ton atau mencapai target sebesar 2,76 % dan turun 97,2 % dari produksi tahun 2020. Faktor penghambat capaian adalah cuaca yang tidak menentu mempengaruhi produksi garam. Curah hujan yang tinggi memperpendek masa produksi dan banyak petani yang gagal produksi karena hujan yang tiba-tiba turun. Terlihat pada tabel 23 produksi garam di 5 kab/kota penghasil garam yang mengalami penurunan produksi yang signifikan.

Tabel 23. Perkembangan produksi garam, luas lahan dan Jumlah RTP per kabupaten/kota tahun 2019 -2021

Kabupaten	Luas Lahan (Ha)			Jumlah RTP			Produksi Tahun –n				Naik/turun tahun sebelumnya
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
Selayar	12.50	12.50	0.7	33	17	1	115.71	156.21	43.10	3,15	-92,7%
Jeneponto	710,76	916,30	854,7	627	628	628	38.769,10	71.956,32	30.595,72	580,55	-98,1%
Takalar	141,54	126,64	126,64	821	847	847	11.104,50	22.358,86	4.264,43	633,4	-85,1%

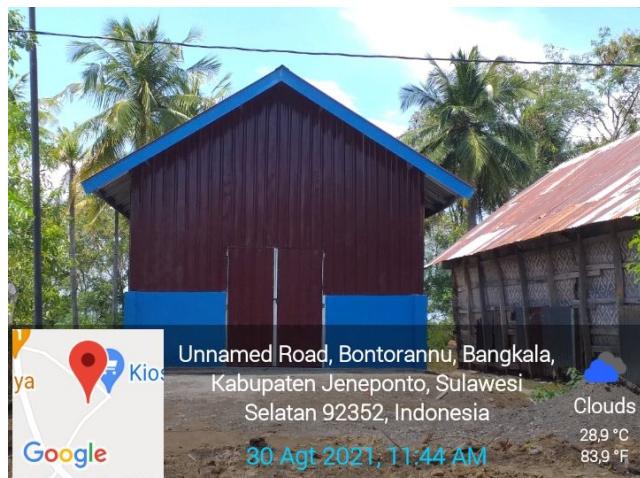
Kabupaten	Luas Lahan (Ha)			Jumlah RTP			Produksi Tahun –n				Naik/turun tahun sebelumnya
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
Pangkep	563.46	563.50	579.56	791	791	754	36,723.40	45,719.98	10,404.26	66	-99,4
Maros	0.40	3.90	1.17	26	26	8	-	147.50	3.00	-	-100
Total	1,428.66	1,622.84	1,436.13	2,298	2,309	2,238	86,712.71	140,338.87	45,310.51	1,283.15	-97,2

Untuk mendorong capaian produksi dan kualitas garam DKP provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2021 telah mengadakan sarana prasarana usaha garam berupa geomembran 4 paket kepada 4 kelompok, gudang garam 7 unit kepada 7 kelompok. Sarana prasarana tersebut untuk menyimpan stok dan menjaga kualitas garam. Pemanfaatan teknologi geomembran untuk mengasilkan garam rakyat yang lebih halus dan putih, agar hasilnya bisa bersaing dengan kualitas garam impor.

Kondisi gudang garam tradisional yang yang sudah lapuh dan tidak layak lagi untuk menyimpan atau menampung garam hasil panen pada musim kemarau maupun musim penghujan. Dengan adanya pembangunan gudang garam rakyat menjaga harga garam tetap stabil disaat stok garam melimpah. Selain itu upaya revitalisasi gudang garam rakyat sesuai dengan spesifikasi gudang tipe C pada SNI 8446:2017 untuk tetap mempertahankan kualitas garam yang tersimpan



Dari hasil monev pemanfaatan gudang garam yang diserahkan tahun 2020 kelompok tidak ragu lagi menyimpan stok garam yang dimiliki saat musim hujan dan saat harga rendah



Revitalisasi gudang garam rakyat (ukuran <100 ton) di Kab. Jeneponto tahun 2021

INDIKATOR 2.2

KONTRIBUSI PDRB PERIKANAN

Data kontribusi PDRB perikanan diperoleh dari Data Badan Pusat Statistik. Rumus penghitungan kontribusi PDRB Perikanan adalah:

$$\text{kontribusi PDRB perikanan} = \frac{\text{Nilai PDRB sektor perikanan}}{\text{Jumlah nilai PDRB Sulawesi Selatan}} \times 100\%$$

Realisasi kontribusi PDRB sub sektor perikanan pada tahun 2021 sebesar 9,40 % atau mencapai target sebesar 204,35 % dan meningkat 10,59 % dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 8,5 %. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah dicapai 167,86 % dari target yang ditetapkan pada tahun 2023.

Tingginya capaian menunjukkan bahwa proyeksi target bahwa pandemi akan berpengaruh pada penurunan produksi ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap aktivitas produksi dan bahkan pasca pandemic covid harga produk perikanan khususnya produk ekspor seperti rumput laut harga sangat menjanjikan yaitu mencapai Rp 20.000 – Rp 30.000 per kilogram.

Tabel 24. Perkembangan nilai produksi perikanan tahun 2018 -2021

Tahun	2018	2019	2020	2021	naik/turun 2020-2021
Total Nilai Produksi (Rp M)	21,781.73	23,592.85	22,487,1	26,559,7	+18.11 %
Nilai Produksi Tangkap (Rp M)	7,987.20	8,631.30	8,678,9	10.679,9	+ 23,06 %
Nilai Produksi Budidaya (Rp M)	13,729.50	14,856.30	13,785.50	15.878,3	+ 15,18 %
Nilai produksi garam (Rp M)	65,03	105,25	22,66	1.52	-93, 30 %

Seiring dengan peningkatan kontribusi PDRB, nilai PDRB perikanan pun meningkat 19,81 % yaitu 42,9 Trilyun pada tahun 2020 menjadi 51,4 Trilyun pada tahun 2021. Nilai produksi pun semakin membaik pasca pandemi khususnya produk ekpor seperti rumput laut dan udang. Nilai ekspor rumput laut meningkat 19,6 % yaitu US\$ 137.662.000 tahun 2020 menjadi US\$ 164.656.000 tahun 2021. Sedangkan udang naik 8,5 % yaitu dari US\$ 75.829 tahun 2020 menjadi US\$ 82.272,1

Tabel 25. Realisasi Ekspor dan Nilai Ekspor Perikanan Tahun 2017 - 2021

Uraian	RealisasiTahun-n				
	2017	2018	2019	2020	2021
Eksport perikanan (Ton)*	126.245,0	130.623,1	166.373,2	158.416,5	179.019,0
Nilai Ekspor Perikanan US \$ (1000)	251.778,3	340.369,3	355.301,7	339.002,9	397.787,7

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya sasaran II

Tabel 26. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Sasaran II

Sasaran	Indikator	Capaian (%)	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persen Capaian Realisasi anggaran	Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 – 7
Sasaran I : meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah produksi dan produktivitas produksi	produksi perikanan	103,64	Program pengelolaan perikanan tangkap	24,908,277,380	16,790,520,331	67,41	76,96 (efisien)
	kontribusi PDRB perikanan terhadap PDRB sulsel	204,35	Program pengelolaan perikanan budidaya	10,379,225,900	10,021,521,740	96,55	
			Program pengelolaan kelautan pesisir dan PPK	4,851,740,777	4,147,351,900	85,48	
Rata-rata capaian		154,0		40.139.244.057	30.959.393.971	77,03	

Dari hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya, tergambaran bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah produksi dan produktivitas produksi dilaksanakan dengan penggunaan sumber daya yang efisien, yaitu capaian kinerja menunjukkan prosentase keberhasilan yang lebih tinggi daripada presentase realisasi penggunaan dana karena capaian indikator sasaran melampaui target.

Selain itu capaian persentase realisasi anggaran hanya mencapai 77,13 % karena tidak terserapnya anggaran karena beberapa pekerjaan tidak selesai seperti pekerjaan kapal sebanyak 11 kapal sehingga mempengaruhi realisasi anggaran program pengelolaan perikanan tangkap . Demikian halnya program pengelolaan kelautan pesisir pesisir dan PPK karena terdapat 1 unit tambatan perahu yang tidak dilaksanakan dan 1 unit tambatan perahu yang tidak selesai di tahun 2021.

Hal ini sesuai dengan materi yang disampaikan pada acara FGD Evaluasi kinerja anggaran tahun 2021 dan peningkatan kinerja anggaran satker lingkup KKP 16 Maret 2022 oleh Subdit Teknologi Infomrasi penganggaran Kementerian Keuangan bahwa **Yang mempengaruhi efisiensi adalah :**

- a. capain indikator sasaran
- b. Penyerapan anggaran

Untuk memperoleh efisiensi yang optimal :

- a. Capaian indikator sasaran **diatas target** dengan penyerapan anggaran **sesuai** pagu yang dialokasikan
- b. Capaian indikator sasaran **diatas target** dengan penyerapan anggaran **kurang** dari pagu yang dialokasikan

Capaian indikator sasaran **sesuai target** dengan penyerapan anggaran **kurang** dari pagu yang dialokasikan

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja sasaran II

Sasaran meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah faktor produksi dan produktivitas produksi dapat dicapai melalui program :

❖ **Program pengelolaan perikanan budidaya, kegiatan pengelolaan pembudidaya ikan di laut dengan sub kegiatan yaitu:**

- Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan di laut target output jumlah sarana prasarana sebanyak 518 paket terealisasi 502 paket karena terdapat 2 kelompok tidak memenuhi syarat teknis.
- Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut target output jumlah induk unggul untuk menghasilkan benih terealisasi 43.334 ekor terdiri dari Ikan Bandeng 8-10 cm sebanyak 33.334 ekor

dan Ikan Kakap Putih 5-8 cm sebanyak 10.000 ekor. Pengadaan benih tersebut diharapkan dapat menjadi induk unggul.

- Penyediaan sarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah Provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota target output Jumlah diseminasi inovasi teknologi budidaya udang windu berbasis kawasan (WINDU BANGKIT) terealisasi 130 unit di 13 kabupaten/kota. Jumlah pengembangan budidaya udang windu 1.000 Ha (WINDU BANGKIT) melalui kegiatan PANDAWA 1000 terealisasi di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang dengan jumlah benur yang ditebar sebanyak 30.000.000 ekor.
- Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah KabupatenKota target output jumlah Pengendalian Kualitas Lingkungan Perikanan Budidaya Perbenihan terealisasi 13 unit.
- Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan target output Jumlah laporan pembinaan dan pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola Oleh Pemerintah Daerah Provinsi terealisasi 1 laporan.
- **Program pengelolaan perikanan tangkap, kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil dengan sub kegiatan yaitu:**

- Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap target output jumlah kapal yang dibangun sebanyak 14 kapal terealisasi 3 kapal karena adanya keterlambatan pekerjaan akibat keterlambatan SPD, faktor cuaca, serta faktor bahan ketersediaan bahan baku.
- Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap target output jumlah mesin usaha perikanan tangkap yang tersedia 14 unit terealisasi 13 unit, Jumlah alat bantu tangkap untuk nelayan target 15 kelompok terealisasi 15 kelompok, Jumlah sarana alat tangkap untuk nelayan target 22 unit terealisasi 20 unit.
- Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan, target output Jumlah penetapan lokasi pembangunan pelabuhan perikanan sebanyak 5 dokumen terealisasi 5 dokumen.
- Penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan, target output Jumlah Penyediaan Sarana prasarana Pelabuhan Yang Terbangun di Wilayah I target 6 unit terealisasi 6 unit dan target output Jumlah Penyediaan Sarana prasarana Pelabuhan Yang Terbangun di Wilayah II sebanyak 5 unit.

Tabel 27. Daftar pelabuhan dan alokasi pembangunan Sarana dan Prasarana tahun 2019-tahun 2021

No	NAMA PELABUHAN PERIKANAN	LOKASI			KETERANGAN
		KAB./KOTA	KECAMATAN	KEL. / DESA	
1	Pelabuhan Perikanan Paotere	Kota Makassar	Ujung Tanah	Kel. Gusung	Pengadaan sarana dan prasarana air bersih (2020)
2	Pelabuhan Perikanan Bontobahari	Kab. Maros	Bontobahari	Kel. Bontoa	TIDAK OPERASIONAL
3	Pelabuhan Perikanan Labuang	Kab. Maros	Turikale	Kel. Pettuadae	Pengadaan sarana dan prasarana air bersih (2020) 1

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2021

No	NAMA PELABUHAN PERIKANAN	LOKASI			KETERANGAN
		KAB./KOTA	KECAMATAN	KEL. / DESA	
4	Pelabuhan Perikanan Maccini Baji	Kab. Pangkep	Labakkang	Kel. Maccini Baji	Pengadaan sarana dan prasarana air bersih (2020) 2
5	Pelabuhan Perikanan Polejiwa	Kab. Barru	Tanete Rilau	Desa Tellumpanua	TIDAK OPERASIONAL
6	Pelabuh Perikanan Sumpang Binangae	Kab. Barru	Barru	Kel. Sumpang Binangae	Rehab TPI (2021) 3
7	Pelabuhan Perikanan Cempae	Kota Parepare	Sumpang Binangae	Kel. Cempae	Pengadaan sarana dan prasarana air bersih (2020), Rehabilitasi Kantor 120 Meter PPI Cempae (2021) 4
8	Pelabuhan Perikanan Lonrae	Kab. Bone	Tanete Riattang Timur	Kel. Lonrae	Jalan Kompleks PPI Lonrae 312.5 Meter (2020) Rehab Kantor UPT Pelabuhan wil 1 (2021) 5
9	Pelabuhan Perikanan Bonepute	Kab. Luwu	Bonepute	Kel. Bonepute	
10	Pelabuhan Perikanan Ulo-Ulo	Kab. Luwu	Belopa	Desa Belopa	
11	Pelabuhan Perikanan Balambang	Kab. Luwu	Bua	Desa Raja	Jaringan instalasi listrik PPI (2021) Turap penahan tanah di PPI (2021) Fasilitas air (tawar) bersih (2021) 6
12	Pelabuhan Perikanan Pontap	Kota Palopo	Wara Timur	Kel. Pontap	Pengadaan air bersih (2019) 7
13	Pelabuhan Perikanan Malili	Kab. Luwu Timur	Malili	Desa Wewangriu	
14	Pelabuhan Perikanan Lappa	Kab. Sinjai	Sinjai Utara	Kel. Lappa	ABF 01 (2021), Rehabilitasi Cold Storage PPI Bontobahari (2021) 8
15	Pelabuhan Perikanan Kajang	Kab. Bulukumba	Kajang	Ds. Tana jaya	Rehabilitasi pelataran PPI Kajang (2019), Jaringan listrik PPI Kajang (2020), Pengadaan sarana dan prasarana air bersih (2020) 9
16	Pelabuhan Perikanan Bontobahari	Kab. Bulukumba	Bontobahari	Desa Tana Lemo	jaringan instalasi listrik PPI Bontobahari (2019), Pengadaan sarana dan prasarana air bersih (2020), ABF 01 (2021), Rehabilitasi Cold Storage PPI Bontobahari 10
17	Pelabuhan Perikanan Birea	Kab. Bantaeng	Pa'jukukang	Desa Pa'jukukang	Pengadaan sarana dan prasarana air bersih (2020), Rehab Wisma Nelayan dan Penataan Lingkungan PPI Birea (2021) 11

No	NAMA PELABUHAN PERIKANAN	LOKASI			KETERANGAN
		KAB./KOTA	KECAMATAN	KEL. / DESA	
18	Pelabuhan Perikanan Tanrusampe	Kab. Jeneponto	Binamu	Kel. Pabiringa	
19	Pelabuhan Perikanan Beba	Kab. Takalar	Galesong Utara	Desa Beba	
20	Pelabuhan Perikanan Benteng Somba Opu	Kab. Gowa	Barombong	Kel. Somba Opu	
21	Pelabuhan Perikanan Lero	Kab. Pinrang	Suppa	Kel. Lero	TIDAK OPERASIONAL
22	Pelabuhan Perikanan Bonehalang	Kab. Kep. Selayar	Benteng	Kel. Benteng Selatan	

- Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan target Jumlah Layanan Operasional pelabuhan perikanan wilayah I dan wilayah II terealisasi 100 %.



operasional pelabuhan yaitu Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan (PPI) Kajang Kab. Bulukumba

- **Program pengelolaan kelautan pesisir dan PPK, kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan PulauPulau Kecil dengan sub kegiatan yaitu:**
 - Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan PulauPulau Kecil dengan target output Jumlah Sarana Inovasi Teknologi Usaha Masyarakat Pesisir sebanyak 4 unit terealisasi 4 unit geomembran.
 - Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan PulauPulau Kecil dengan target output Jumlah sarana dan prasarana usaha garam sebanyak 7 unit terealisasi 7 unit gudang garam rakyat.
 - Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Informasi Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dengan target output Jumlah peserta koordinasi dan pembinaan teknis peningkatan produksi garam terealisasi 180 orang dan Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan usaha alternatif masyarakat pesisir berbasis inovasi terealisasi 1 kelompok.



Gambar 9. Revitalisasi Gudang Garam dibawah 100 ton di Kabupaten Jenepono tahun 2020



Gambar 10. Gudang Garam kapasitas 1.000 ton dilengkapi Coveyor di Kab.Takalar tahun 2019

- Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan target output jumlah tambatan perahu yang terbangun target 14 unit terealisasi 12 unit. 1 unit tambatan perahu di Pulau Lanjukang, Kel. Barrang Caddi, Kec. Kepulauan Sangkarrang, Kota Makassar tidak dilaksanakan karena telah dianggarkan oleh Pemerintah Kota Makassar dan 1 unit tambatan perahu di Pulau Samalona Kota

Makassar hanya terealisasi 90 % karena mengalami keterlambatan akibat faktor cuaca.

Secara lengkap data target dan capaian output serta perbandingannya dengan tahun lalu dapat dilihat pada tabel Data target dan capaian output serta perbandingannya dengan tahun lalu di halaman lampiran.

f. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut

Permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan program dan kegiatan adalah :

- ❖ Pengembangan udang windu ditemukan permasalahan anomali iklim yang sangat ekstrim. Hujan terjadi dimana-mana mengakibatkan hampir semua lokasi Diseminasi yang ada di 13 Kabupaten/Kota mengalami banjir.
- ❖ Produksi garam turun akibat faktor cuaca yang tidak mendukung proses produksi.
- ❖ Realisasi persentase pelabuhan perikanan memenuhi standar operasional sebesar 52,63 % atau mencapai target sebesar 90.92 %. Salah satu faktor penghambat capaian kinerja adalah beberapa pelabuhan belum memiliki penetapan kelas, terbatasnya SDM untuk penetapan kelembagaan sesuai Pergub nomor 67 tahun 2020

Tindak Lanjut yang akan dilakukan adalah :

- ❖ Perlunya membuat jadwal tebar yang sesuai dengan jadwal tebar pembudidaya. Kesiapan benih saat waktu tebar petani dan pembudidaya
- ❖ Perlu mengkaji dan uji coba penerapan teknologi tunnel/rumah prisma dengan konstruksi “diperbaharui” sebagai percontohan/kawasan di

lokasi penghasil garam. Dengan penerapan teknologi tunnel garam dapat membantu petani untuk tetap berproduksi meski sedang hujan.

- ❖ Telah dalam tahap pengusulan penetapan kelas ke kementerian kelautan perikanan sebanyak 8 pelabuhan yaitu PPI pontap, PPI Lonrae, PPI Lappa, PPI Cempae, PPI Kajang , PPI Bontobahri, PPI Maccini Baji dan PPI Beba sehingga diharapkan nantinya 10 PPI telah penetapan kelas dan selanjutnya penetapan kelembagaan pelabuhan sesuai pergub 67 tahun 2020 tentang pengelolaan pelabuhan perikanan



Keberhasilan capaian sasaran strategis meningkatnya meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan diukur dengan indikator konsumsi ikan.

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja sasaran III

Tabel 28. Capaian Kinerja indikator sasaran III Tahun 2021

Indikator Kinerja Sasaran	2021		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
Konsumsiikan (kg/kap/tahun)	59,5	68,3	114,79

Realisasi konsumsi ikan tahun 2021 sebesar 68,3 kg/kap/tahun atau mencapai target sebesar 114,79 %.

b. Perbandingan antara realiasi kinerja sasaran III tahun ini dengan tahun sebelumnya target jangka menengah (RPJMD)

Tabel 29. Perkembangan Capaian Kinerja indikator sasaran III dan Capaian terhadap target RPJMD

Indikator Kinerja Sasaran	2017	2018	2019	2020	2021	Target Akhir RPJMD 2023	Capaian terhadap 2023 (%)
Konsumsiikan (kg/kap/tahun)	55.2	56.3	64.7	65.5	68,3	65,9	103,64

Realisasi konsumsi ikan tahun 2021 sebesar 68,3 kg/kap/tahun naik sebesar 4,27 % dan kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dengan kenaikan rata-rata 6,96 %. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah menacapai target sebesar 103,64 %.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja sasaran III serta alternative solusi yang telah dilakukan

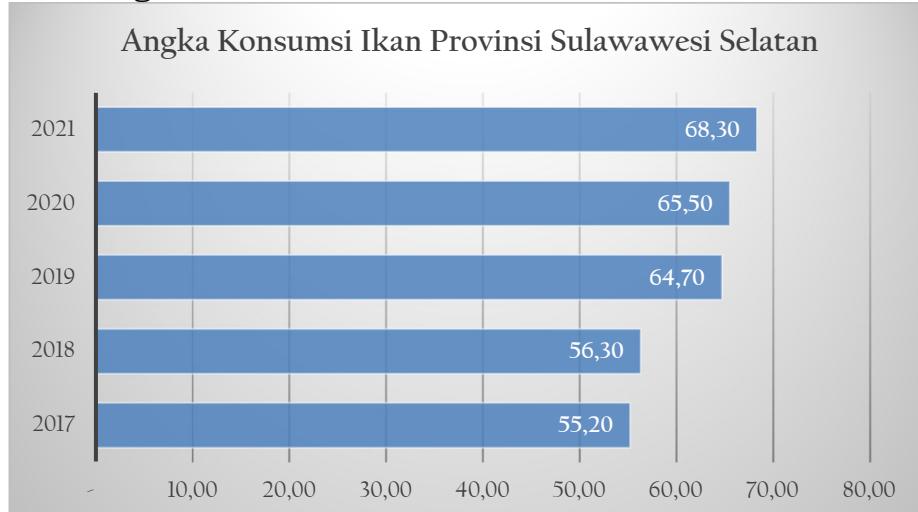
INDIKATOR 3.1	KONSUMSI IKAN
---------------	---------------

Formulasi untuk mengukur konsumsi ikan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\text{Konsumsi Ikan} = \frac{(total produksi - produksi bukan bahan makanan) - ekspor - 15 \%}{(Jumlah penduduk pertengahan tahun /2)}$$

Keterangan : 15% adalah data produk diantarpulau yang tak terhitung (range 0 – 15 %)

Grafik 4.
Perkembangan Konsumsi Ikan Prov. Sul Sel tahun 2017 – 2021



Berdasarkan grafik diatas terlihat angka konsumsi ikan pada tahun 2021 terus meningkat dari tahun ke tahun bahkan telah melampaui target nasional. Jika dibandingkan dengan target nasional sebesar 74.39 % capaian angka konsumsi ikan sulsel sebesar 91.81 %. Peningkatan konsumsi ikan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan produksi perikanan baik produksi budidaya maupun perikanan tangkap. Tingginya angka konsumsi ikan karena Sulawesi Selatan memiliki masyarakat yang mengkonsumsi ikan cukup tinggi dan memiliki budaya makan ikan yang tinggi serta pencapaian dari perikanan tangkap dan budidaya yang cukup mendukung.

Hal ini didukung pernyataan Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ibu Susi Pudjiastuti pada media online infonawacita.com yang dirilis tanggal 27 November 2016 lalu.



Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menunggu detik-detik kedekahan kapal nelayan asal Thailand di Selat Dempo, Kepri, Senin (9/2). Kapal bersama 12 nelayan asing itu ditangkap oleh Kapal Patroli (KP) Hu 009 Balor Kamala saat menangkap ikan dengan jaring pukat harimau (trap) di perairan Tambelan, Kepri bulan November 2014 lalu. ANTARA
FOTO/Joko Sulistyono/ed/ama/15

INFONAWACITA.COM – Konsumsi ikan di Sulawesi Selatan tercatat paling tinggi se-Indonesia. Hal ini salah satunya karena provinsi ini adalah provinsi maritim dengan hasil tangkapan ikan yang melimpah per tahunnya.

Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, di Makassar, Sabtu (26/1). "Sulsel ini provinsi maritim dan bahkan Kota Makassar saja punya banyak pulau dibandingkan kota-kota lainnya. Angka konsumsi ikan masyarakatnya tertinggi di Indonesia," ujar Susi.

Dipaparkan Susi, masyarakat Sulawesi Selatan tercatat memiliki kemampuan konsumsi ikan sebanyak 60-80 kilogram per kapita per tahunnya. Ini berdasarkan angka konsumsi ikan per kabupaten/kota maupun provinsi. Beberapa daerah di Pulau Jawa, seperti Kota Yogyakarta dan Solo hanya rata-rata 16 kilogram per kapitanya. Angka konsumsi ikan secara keseluruhan nasional hanya 46 kilogram per kapita. "Banyak orang-orang Sulsel pintar-pinter, cerdas karena memang konsumsi proteinnya sangat tinggi," imbuhnya.

Pernyataan ibu Susi Pudjiastuti terkait tingginya konsumsi ikan di Provinsi Sulawesi Selatan karena tingginya produksi perikanan khususnya produksi perikanan tangkap
(sumber :infonawacita.com)

d. Analisis Efisiensi

Tabel 30. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Sasaran III

Sasaran	Indikator	Capaian (%)	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persen Realisasi anggaran	Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 – 7
Sasaran III : Meningkatnya Konsumsi Ikan dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Konsumsi Ikan	114.79	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	1.700.829.096	1.662.551.848	97.75	17.04
Rata-rata capaian		114.79				97.75	

Dari hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dapat dikatakan bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang efisien, karena capaian kinerja menunjukkan prosentase keberhasilan yang lebih tinggi daripada persentase realisasi penggunaan dana. Tingginya capaian kinerja sasaran disebabkan capaian konsumsi ikan yang melampaui target yang telah ditetapkan.

Hal ini sesuai dengan materi yang disampaikan pada acara FGD Evaluasi kinerja anggaran tahun 2021 dan peningkatan kinerja anggaran satker lingkup KKP 16 Maret 2022 oleh Subdit Teknologi Infomrasi penganggaran Kementerian Keuangan bahwa **Yang mempengaruhi efisiensi adalah :**

- c. capaian indikator sasaran
- d. Penyerapan anggaran

Untuk memperoleh efisiensi yang optimal :

- e. Capaian indikator sasaran **diatas target** dengan penyerapan anggaran **sesuai** pagu yang dialokasikan

- f. Capaian indikator sasaran **diatas target** dengan penyerapan anggaran **kurang** dari pagu yang dialokasikan
- g. Capaian indikator sasaran **sesuai target** dengan penyerapan anggaran **kurang** dari pagu yang dialokasikan
- e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sasaran III**
- Sasaran meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan dapat dicapai melalui program:
- Program Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dengan kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar dan kegiatan dengan rincian subkegiatan :
 - Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar target output jumlah Inovasi Teknologi Produk Olahan Hasil KP Konsumsi dan Non Konsumsi sebanyak 5 jenis terealisasi 5 jenis yaitu inovasi produk olahan berbasis rumput laut seperti mie , permen, sabun, lotion dan masker; target jumlah promosi yang diikuti sebanyak 1 terealisasi 1 yaitu promosi produk olahan perikanan dalam rangka pencegahan stunting, dan target jumlah peserta koordinasi dan pembinaan teknis peningkatan produksi olahan 50 orang terealisasi 50 orang.
 - Pelaksanaan Bimbingan Fasilitasi Pemantauan dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan dan Berdaya

Saing target output jumlah Unit Usaha Pengolah Yang Mendapatkan Pengembangan mutu produk target 1.500 sampel terealisasi 1033sampel disebabkan dampak kondisi pandemi sehingga dampak kondisi pandemi sehingga permintaan pengujian menurun dan adanya kerusakan alat untuk pengujian logam berat sehingga pengujian tidak optimal berjalan di akhir tahun 2020 dan mulai optimal berjalan di bulan April tahun 2021; target output Jumlah Unit Usaha Pengolah Yang Mendapatkan Pengembangan mutu produk 70 UPI terealisasi 70 UPI; target Jumlah validasi sarana prasarana laboratorium pengujian 1 unit terealisai 1 unit.

Secara lengkap data target dan capaian output serta perbandingannya dengan tahun lalu dapat dilihat pada tabel Data target dan capaian output serta perbandingannya dengan tahun lalu di halaman lampiran.

f. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut

Permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan program dan kegiatan adalah :

- ❖ Persentase Pembinaan Mutu Produk Perikanan tahun 2021 terealisasi 54,08 % atau mencapai target sebesar 90,13 %. Pembinaan mutu produk perikanan dilaksanakan melalui pengujian mutu produk perikanan dimana jumlah pengujian mutu produk perikanan di tahun 2019 sebesar 1.508 sampel, di tahun 2020 sebesar 1.492 sampel dan tahun 2021 turun menjadi 1.056 Faktor penghambat tidak tercapainya target disebakan karena dampak kondisi pandemi sehingga permintaan pengujian menurun dan adanya kerusakan alat untuk pengujian logam berat sehingga pengujian tidak optimal berjalan di akhir tahun 2020 dan mulai optimal berjalan di bulan April tahun 2021.

Tindak Lanjut yang akan dilakukan adalah :

- ❖ Melaksanakan inovasi sejuta ikan yaitu inovasi dalam untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan berupa pengambilan sampel dan pengantaran sertifikat hasil uji yang dilakukan oleh petugas UPT tanpa dipungut biaya. Jumlah hari pengujian pun lebih singkat yaitu dari 12 hari menjadi 6 hari. Selain itu dilakukan validasi sarana dan prasarana laboratorium secara rutin untuk memastikan sarana prasarana pengujian berfungsi dengan baik.



Keberhasilan capaian sasaran strategis meningkatnya meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan diukur dengan satu indikator yaitu Nilai Tukar Nelayan (NTN).

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja sasaran IV

Tabel 31. Capaian Indikator Kinerja Sasaran IV

Indikator Kinerja Sasaran	2021		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai Tukar Nelayan	102,37	107,43	104,94

Realisasi NTN tahun 2021 adalah 107,43 atau mencapai 104,94 % dari target tahun 2021 yaitu yang 102,37.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran IV tahun ini dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah (RPJMD)

Tabel 32. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran IV tahun 2017-2021 dan capaian terhadap target akhir RPJMD

Indikator Kinerja Sasaran	2017	2018	2019	2020	2021	Target Akhir RPJMD 2023	Capaian 2021 terhadap 2023 (%)
Nilai Tukar Nelayan	107,6	107,8	107,60	99,64	107,43	103,19	104,11

Realisasi NTN tahun 2021 sebesar 107,43 naik 7,82 % dibandingkan tahun 2020 sebesar 99,64. Jika dibandingkan dengan target yang akan dicapai pada akhir tahun RPJMD tahun 2023 sebesar 103,19 maka telah dicapai 104,11 %

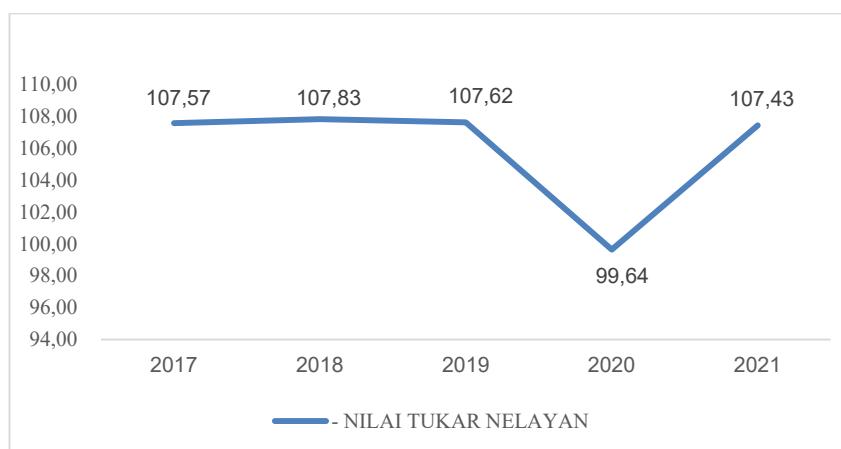
c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja sasaran IV serta alternative solusi yang telah dilakukan

INDIKATOR 4.I	NILAI TUKAR NELAYAN
---------------	---------------------

Data Nilai Tular Nelayan atau NTN bersumber dari Bada Pusat Statistik (BPS) dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$Konsumsi Ikan = \frac{\text{Indeks yang diterima nelayan (it)} \times 100 \%}{\text{Indeks yang dibayar nelayan (Ib)}}$$

Realisasi NTN tahun 2021 adalah 107,43 atau mencapai 104,94 % dari target yang telah ditetapkan tahun 2021 dan mengalami kenaikan sebesar 7,82 % dibandingkan tahun 2020. Jika dibandingkan dengan target yang akan dicapai pada akhir tahun RPJMD tahun 2023 sebesar 103,19 maka telah dicapai sebesar 104,11 % dari target.



Berdasarkan grafik diatas Indeks yang diterima (*it*) nelayan jauh lebih besar dibanding indeks yang harus dibayar (*ib*) oleh nelayan pada tahun 2021.

Hal ini sangat berbeda dibandingkan tahun 2020 dimana kondisi pandemi yang membatasi aktivitas masyarakat dengan diberlakukannya lockdown di berbagai negara dan PSBB di beberapa daerah sehingga berdampak pada menurunnya permintaan pasokan ikan hasil tangkapan . Tahun 2021 kondisi mulai normal sehingga aktivas ekonomi masyarakat pun mulai kembali normal didukung produksi yang meningkat sehingga berpengaruh pada pendapatan nelayan.

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya sasaran IV

Tabel 33. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya sasaran IV

Sasaran	Indikator	Capaian (%)	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persen Realisasi anggaran	Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 – 7
Sasaran I V: meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan	Nilai Tukat Nelayan (NTN)	104.94	Program pengelolaan perikanan tangkap	18.101.066.575	10.018.593.700	55.35	49.59 (efisien)
Rata-rata capaian		104.94				55.35	

Dari hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya, pencapaian indikator kinerja sasaran meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang efisien, karena capaian kinerja menunjukkan persentase keberhasilan yang lebih tinggi daripada prosentase realisasi penggunaan dana. Rendahnya capaian anggaran disebabkan tidak terserapnya anggaran karena beberapa pekerjaan tidak selesai seperti pekerjaan kapal sebanyak 11 kapal dan tidak terlaksananya Pertemuan Bimbingan Teknis Penanganan Hasil Tangkapan Di Kapal sehingga mempengaruhi realisasi anggaran program pengelolaan perikanan tangkap . Sedangkan tingginya capain indikator sasaran karena prediksi target perencanaan bahwa covid 2019 berdampak kepada

nelayan ternyata tidak terjadi di tahun 2021. Dengan pelaksanaan *new normal* dimana masyarakat mulai beraktifitas sehingga pendapatan nelayan pun mulai kembali normal.

Hal ini sesuai dengan materi yang disampaikan pada acara FGD Evaluasi kinerja anggaran tahun 2021 dan peningkatan kinerja anggaran satker lingkup KKP 16 Maret 2022 oleh Subdit Teknologi Infomrasi penganggaran Kementerian Keuangan bahwa **Yang mempengaruhi efisiensi adalah :**

- a. capain indikator sasaran
- b. Penyerapan anggaran

Untuk memperoleh efisiensi yang optimal :

- a. Capaian indikator sasaran **diatas target** dengan penyerapan anggaran **sesuai** pagu yang dialokasikan
- b. Capaian indikator sasaran **diatas target** dengan penyerapan anggaran **kurang** dari pagu yang dialokasikan

Capaian indikator sasaran **sesuai target** dengan penyerapan anggaran **kurang** dari pagu yang dialokasikan

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja sasaran IV

Sasaran meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan dapat dicapai melalui program Program pengelolaan perikanan tangkap kegiatan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil sub kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap dan kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat di Usahakan Lintas kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) derah Provinsi sub kegiatan penjaminan ketersediaan sarana prasaran usaha perikanan

tangkap sebagaimana telah dijelaskan pada analisis program /kegiatan yang menunjang dan keberhasilan pencapaian sasaran II sebelumnya.

Secara lengkap data target dan capaian output serta perbandingannya dengan tahun lalu dapat dilihat pada tabel Data target dan capaian output serta perbandingannya dengan tahun lalu di halaman lampiran.

f. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut

Permasalahan yang timbul pada pelaksanaan program dan kegiatan adalah :

❖ Indikator program pengelolaan perikanan tangkap yaitu Cakupan bina kelompok nelayan terealisasi sebesar 19,11 % atau mencapai 79,98 % dari target. Hal ini disebabkan tahun 2021 target pembinaan kelompok sebanyak 75 kelompok terealisasi 60 kelompok dari target cakupan keseluruhan kelompok sebanyak 314. Faktor penghambat capaian kinerja adalah persyaratan teknis bantuan tidak dapat dipenuhi oleh kelompok yang diusulkan dan keterbatasan anggaran karena untuk mendukung program prioritas lainnya seperti penyediaan sarana prasarana pelabuhan sehingga pengalokasian anggaran tidak sepenuhnya terpenuhi untuk pembinaan kelompok nelayan.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah :

❖ Koordinasi dengan pihak kabupaten/kota dan penyuluhan untuk usulan kelompok nelayan yang sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan.



Keberhasilan capaian sasaran strategis meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan diukur dengan 3 indikator yaitu : (1) rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial, (2) proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman, (3) persentase penurunan tindakan IUU Fishing

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja sasaran V

Tabel 34. Capaian indikator Kinerja Sasaran V

Indikator Kinerja Sasaran	2021		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
Rasio Kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial (%)	1,05	1,57	149,52
Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	35,72	56,12	157,11
Persentase penurunan tindakan IUU Fishing	20.83	83.33	50.01

Tahun 2021 target rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial adalah 1,05 % dapat direalisasikan sebesar 1,57 % atau

mencapai 149,52 % dari target. Realisasi proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman adalah 57,74 % atau mencapai 161,64 % dari target 35,72 %. Realisasi persentase penurunan tindakan IUU Fishing sebesar 83,33 % atau mencapai target sebesar 50,01 %.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran V tahun ini dengan tahun sebelumnya target jangka menengah (RPJMD)

Tabel 35. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran V tahun 2019-2021 dan capaian terhadap target akhir RPJMD

Indikator Kinerja Sasaran	2017	2018	2019	2020	2021	Target Akhir RPJMD 2023	Capaian 2021 terhadap 2023 (%)
Rasio Kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial (%)	0,22	1,01	1,56	1,57	1,57	1,01	155,45
Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	48,4	48,92	53,59	52,18	56,12	42,44	132,44
Persestase penurunan tindakan IUU Fishing					83,33	35,71	14,30

Realisasi rasio kawasan lindung perairan meningkat dari tahun ke tahun yaitu 0,22 menjadi 1,57 tahun 2021. Hal ini disebabkan adanya pelimpahan keweenenangan berdasarkan UU 23 tahun 2014. Jika dibandingkan dengan target akhir akhir RPJMD yang akan dicapai pada tahun 2023 sebesar 1,01 maka telah dicapai 155,45 % atau telah melampaui target akhir RPJMD. Realisasi proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan bilogis yang aman mengalami peningkatan sebesar 7,6 % dari tahun 2020. Jika dibandingkan dengan target akhir

RPJMD maka telah dicapai 132,44 %. Realisasi penurunan tindakan IUU Fishing terealisasi 83,33 % dan mencapai 14,3 % dari target RPJMD.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja sasaran V serta alternative solusi yang telah dilakukan

INDIKATOR 5.I	RASIO KAWASAN LINDUNG PERAIRAN TERHADAP TOTAL LUAS PERAIRAN TERITORIAL
---------------	--

Formulasi untuk mengukur rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial adalah :

$$\text{Rasio kawasan lindung perairan} = \frac{\text{Luas kawasan lindung perairan}}{(\text{Total luas perairan territorial yaitu } 43.047.900 \text{ Ha})}$$

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 dijelaskan bahwa Kawasan Konservasi Perairan (KKP) adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Sampai dengan tahun 2020 terdapat 7 kawasan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 36. Perkembangan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang dikelola dan upaya penanaman mangrove

URAIAN	TAHUN 2018		TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2020
	PENAMBAHAN	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Penetapan KKPD	433,548.94	674,105.80	674,105.80	674,105.80	674,105.80
Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Luwu Utara (Ha)		1,755.15	1,755.15	1,755.15	1,755.15
Kawasan Konservasi Kabupaten Kabupaten Pangkajene/KKPD Tupabiring	-	66,870.00	66,870.00	66,870.00	66,870.00
Kawasan Konservasi Kabupaten Pangkep KKPD Liukang Tangayya	-	171,931.71	171,931.71	171,931.71	171,931.71
Kawasan Konservasi Teluk Bone (SK Pencadangan Gubernur)	423,942.00	423,942.00	423,942.00	423,942.00	423,942.00
Kawasan Konservasi Kabupaten Kep. Selayar Pulo Pasi Gusung (SK Pencadangan Gubernur)	5,018.00	5,018.00	5,018.00	5,018.00	5,018.00
Kawasan Konservasi Kabupaten	3,983.00	3,983.00			

URAIAN	TAHUN 2018		TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2020
	PENAMBAHAN	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Kep. Selayar Kepulauan Selayar Pulo Kauna Kayuadi (SK Pencadangan Gubernur)			3,983.00	3,983.00	3,983.00
Kawasan Konservasi Kabupaten Kabupaten Barru/KKPD Panikiang	605.94	605.94	605.94	605.94	605.94
Daerah Perlindungan Laut		3.00	15.00	68,7	147.18
Rehabilitasi/Konservasi (Ha) Mangrove (Ha)		3	12	53.7	78.34
Rehabilitasi/Konservasi Terumbu Karang (Ha)	-	-	-	-	0.14
Rehabilitasi/Konservasi Padang Lamun (Ha)	-	-	-	-	-
Total Luas		674,108.80	674,120.80	674,174.50	674,252.98

Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan sumberdaya kelautan dan perikanan maka pada periode tahun 2017 – 2021, tahun 2017 telah dikelola seluas 95.752,1 Ha, tahun 2018 seluas 674.08,8, dengan melakukan upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan pada tingkat ekosistem, jenis dan genetik termasuk penguatan fungsi otoritas pengelolaan konservasi sumberdaya ikan maka pada tahun 2020 pengelolaan meningkat menjadi 674.174,5 Ha hingga pada tahun 2021 dengan adanya kewenangan pengelolaan yang diatur dalam UU23/2014 sehingga pengelolaan Kawasan konservasi berdasarkan kewenangan Provinsi Sulawesi Selatan telah mencapai 674.252,98 Ha.

Tabel 38. Realisasi Rasio Kawasan Lindung Perairan Tahun 2017 - 2021

Bidang/Urusan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kawasan lindung perairan (Ha)	95,752.10	674.108,8	674.120.8	674.174.5	674.252,98
Total Luas perairan territorial (Ha)	43,047,900.0	43.047.900	43.047.900	43.047.900	43.047.900
Rasio Kawasan Lindung perairan terhadap total luas perairan territorial (%)	0.22	1,56	1,57	1,57	1,57

Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan sebesar 674.252,98 terdiri dari pencadangan kawasan konservasi daerah sebanyak 7 kawasan dengan luas total 674.105,8 dan Daerah Perlindungan Laut (DPL) berupa rehabilitasi mangrove sampai dengan tahun 2021 adalah 147,04 Ha dan rehabilitasi terumbu karang seluas 1.384 m² atau sama dengan 0,14 Ha . Dari 7 usulan kawasan konservasi perairan daerah, 2 KKPD yaitu Kawasan Konservasi Perairan Liukang Tuppabiring dan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkep dalam tahap konsultasi publik untuk proses penetapan kawasan.

Tabel 36. Luasan dan Lokasi Rehabilitasi Ekosistem Mangrove tahun 2021

Uraian	Lokasi	Kab/Kota
CDK BOSOWASI		
Penanaman Mangrove 30.000 batang	Desa Laoni Kec Cenrana Kab Bone	Bone
Penanaman Mangrove 36160 batang	Kab Sinjai	Sinjai
Penanaman Mangrove 36160 batang	Kab Wajo	Wajo
CDK LUWU RAYA		
Bibit Mangrove 33000 Batang	Luwu Utara	Luwu Utara
Bibit Mangrove 32000 Batang	Luwu	Luwu
Bibit Mangrove 40000 Batang	Kec Suli Kab. Luwu	Luwu
Bibit Mangrove 40000 Batang	Luwu timur	Luwu Timur
Bibit Mangrove 20000 Batang	Desa Pengkajoang Kec. Malangke	Luwu Utara
Bibit Mangrove 40.000 Batang	Palopo	Palopo
CDK WILAYAH SELATAN		
Bibit Mangrove 33000 Batang	Jeneponto	Jeneponto
Mangrove 10000 Batang	Ujung Loe Bulukumba	Bulukumba
Mangrove 15000 Batang	Jeneponto	Jeneponto
Mangrove 38000 Batang	Jeneponto	Jeneponto
CDK MAMINASATA		

Uraian	Lokasi	Kab/Kota
Mangrove 40000 Batang	Makassar	Makassar
Mangrove 40000 Batang	Maros	Maros
Bibit mangrove 38000 Batang	Makassar	Makassar
Bibit mangrove 40000 Batang	Takalar	Takalar
CDK PANGKEP		
Bibit mangrove 40000 Batang	Pangkep	Pangkep
Bibit mangrove 40000 Batang	Pangkep wilayah Kepulauan	Pangkep
Rehabilitasi mangrove 20000 Batang	Kel. Teko Labua Kec. Pangkajene Kab. Pangkep	Pangkep
CDK SELAYAR		
Bibit mangrove 19840 Batang	Kepulauan Selayar	Selayar
CDK AJATAPPARENG		
Bibit Mangrove 40000 Batang	Kab, Barru	Barru
Bibit Mangrove 40000 Batang	Kab. Pinrang	Pinrang
Bibit Mangrove 20.200 Batang	Kota Pare-Pare	Pare-Pare

Upaya untuk melestarikan dan mengembalikan fungsi eksositem pesisir sebagaimana penetapan kawasan konservasi diatas, juga diperlukan upaya reahabilitasi ekosistem pesisir yaitu salah satunya dengan melakukan penanaman mangrove. Hasil tanam mangrove yang dilakukan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 sebagaimaa ditunjukkan pada tabel 32.



mangrove Transplantasi karang dan apartemen ikan dibangun untuk menjadi rumah yang dapat dihuni oleh

Rehabilitasi terumbu karang dilaksanakan dengan transplantasi karang dan pembuatan apartemen ikan. Aksi rehabilitasi ekosistem laut tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 37. Luasan dan Lokasi Rehabilitasi terumbu karang tahun 2021

Aksi rehabilitasi terumbu karang	Luasan	Lokasi
Apartemen Ikan	200 m2	Desa Mattiro Deceng Kecamatan Liukang Tuppabiring Kab. Pangkep
Apartemen Ikan	200 m2	Desa Mattiro Walie Kec. Liukang Tuppabiring Utara) Kab, Pangkep
Apartemen Ikan	100 m2	Desa Rantebelu Kec. Larompong Kab. Luwu
Apartemen Ikan	100 m2	Desa Cimpu Kec. Suli Kab. Luwu
Transpalantasi Terumbu Karang	148 m2	Pulau Barang Lompo Kota Makassar
	148 m2	Pulau Samalona Kota Makassar
Apartemen Ikan	37,5 m2	Pulau Barrang Lompo, Kel Barrang Lompo, Kec Kep Sangkarrang
Apartemen Ikan	250 m2	Kabupaten Barru
	200 m2	Kabupaten Pinrang

Aksi rehabilitasi terumbu karang	Luasan	Lokasi
Apartemen Ikan		Kabupaten Bulukumba
Apartemen Ikan		Kab. Jeneponto



Transplantasi karang dan apartemen ikan dibangun untuk menjadi rumah yang dapat dihuni oleh ikan-ikan karang yang terumbu karangnya telah rusak dan mati agar dapat menjadi tempat hidup baru, tempat berkembang biak, dan habitat baru untuk ikan dan biota karang lainnya

Aksi penanaman mangrove perlu dukungan dan kepedulian masyarakat untuk ikut menjaga kelestarian lingkungan perairan. Oleh karenanya perlu melibatkan masyarakat sekitar mulai dari aktivitas penanaman hingga pemeliharaan dengan pelibatan masyarakat.



Foto sebelah kiri saat penanaman mangrove dan foto sebelah kanan foto setelah beberapa bulan penanaman mangrove

Hasil kunjungan lapangan dari pelaksanaan penanaman mangrove di Kab. Sinjai dan Kab. Bulukumba didapatkan informasi bahwa pelibatan penyuluhan untuk merekomendasikan kelompok sangat efektif karena dari data kelompok penyuluhan didapatkan informasi latar belakang kelompok. Hal ini terekam dari informasi penyuluhan mengapa mereka menunjuk kelompok Pokdakan Marana sebagai kelompok pengelola Mangrove di Kabupaten Sinjai. Ketua kelompok Pokdakan Marana yakni Pak Husain (umur 61 tahun) merupakan pembudidaya tambak pernah melakukan penanaman mangrove secara mandiri karena lokasi tambak yang dimiliki berada di pesisir dekat dengan pantai. Penanaman mangrove tersebut dilakukan sekitar 20 tahun yang lalu dan mangrove yang ditanam tumbuh sampai sekarang. Atas pendekatan tersebut penyuluhan menawarkan Pokdakan Marana untuk ikut berpartisipasi terhadap kegiatan rehabilitasi mangrove dengan syarat kelompok harus tetap merawat dan menjaga mangrove tersebut pasca tanam dan persyaratan tersebut dipenuhi kelompok.

INDIKATOR 5.2

PROPORSI TANGKAPAN IKAN YANG BERADA DALAM BATASAN BIOLOGIS YANG AMAN

Formulasi untuk mengukur proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman adalah :

$$\text{Proporsi tangkapan ikan} = \frac{\text{Jumlah tangkapan tahun } n}{80\% \text{ dari tangkapan maksimum lestari yaitu } 743.776 \text{ ton}} \times 100\%$$

Tabel 39. Realisasi Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman Tahun 2017- 2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Tangkapan Ikan (Ton)	359.770,1	363.853,0	398.565,2	389.208,2	417.410,7
80% dari Tangkapan Maksimum Lestari (Ton)	743.776	743.776,0	743.776,0	743.776,0	743.776,0
Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	48,4	48,92	53,59	52,33	56,12

Pada tahun 2021 realisasi proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman adalah 56,12 % atau mencapai 157,11 % dari target 35,72 %. Proporsi tangkapan mengalami peningkatan sebesar 7,6 % dari tahun 2020. Peningkatan tersebut disebabkan produksi tangkap naik di tahun 2021.

Manfaat Indikator ini digunakan untuk memantau kelestarian sumberdaya ikan dan kelangsungan usaha penangkapan karena sebagai data kontrol produksi perikanan tangkap untuk tidak melebihi 100 persen dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan (Total Allowable Catch/TAC). Potensi lestari (Maximum Sustainable Yield/MSY) sumber daya perikanan tangkap tahun 2011 untuk nasional diperkirakan 6,4 juta ton per tahun dan untuk propinsi Sulawesi Selatan dengan potensi 929,7 ribu ton per tahun, sedangkan potensi yang dapat dimanfaatkan (Total Allowable Catch/jumlah tangkapan yang diperbolehkan/JTB) adalah 80 persen dari MSY atau sebesar 5,12 juta ton untuk nasional dan untuk provinsi sebesar 743.800 ton. Jumlah total hasil tangkapan ikan dari laut adalah penjumlahan dari produksi ikan dari seluruh kabupaten/kota. Data MSY ini diperoleh dari Komisi Nasional Pengkajian Ikan

sehingga batasan biologis berada pada kategori aman dimana proporsi tangkapan ikan provinsi Sulawesi Selatan < 100%.

Dari tahun 2017 sampai dengan saat ini, proporsi tangkapan ikan di Sulawesi Selatan berada dalam batasan biologis yang aman masih dibawah angka jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan pada pembangunan nasional, proporsi tangkapan ikan harus dipertahankan untuk berada dalam batasan biologis yang aman. Upaya yang dilakukan adalah bantuan sarana penangkapan ikan yang ramah lingkungan, patroli pengawasan untuk memantau penggunaan alat tangkap nelayan agar tidak menggunakan alat tangkap yang merusak (*destructive fishing*) seperti yang banyak ditemukan adalah bahan peledak.

INDIKATOR 5.3	PERSENTASE PENURUNAN TINDAKAN IUU FISHING
---------------	---

Persentase penurunan tindak IUU fishing di dapatkan dengan formulasi berikut :

$$\frac{\text{Jumlah kasus yang ditangani tahun } n - \text{jumlah kasus yang ditangani tahun } n-1}{\text{jumlah kasus yang ditangani tahun } n} \times 100 \%$$

Kurun waktu 2019 - 2021 jumlah kasus yang ditangani oleh unit kerja sebagaimana tebel berikut. Meningkatnya jumlah kasus yang ditangani karena semakin intensnya koordinasi dan kolaborasi Cabang Dinas Kelautan dengan pihak terkait yakni POLAIRUD, KKP dalam penegakan hukum dan memberikan efek jera kepada pelaku dan menjadi contoh bagi pelaku usaha yang lain.

Tabel 40. Jumlah penanganan kasus di 7 wilayah Cabang Dinas Kelautan

NO	UNIT KERJA	Jumlah Kasus yang ditangani tahun (n-2)	Jumlah Kasus yang ditangani tahun (n-1)	Jumlah Kasus yang ditangani tahun (n)
		2020	2020	2021
1	CDK Wilayah Selatan	-	1	3
2	CDK Maminasata	-	2	4
3	CDK Bosowasi	4	1	8
4	CDK Ajatappareng	-	-	-
5	CDK Luwu Raya	-	-	-
6	CDK Selayar	-	-	3
7	CDK Pangkep	-	8	4
TOTAL		4	12	22

Hasil dari pengawasan patroli didapatkan tingkat kepatuhan pelaku usaha perikanan tangkap yaitu sebagaimana rincian berikut :



Tabel 41. Persentase kepatuhan pelaku Usaha KP

Tahun	Jumlah unit kapal perikanan yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (unit)	Jumlah unit kapal perikanan yang patuh terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (unit)	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (%)
2020	371	234	63,07
2021	357	228	63,87

Jenis Tindak Pidana Perikanan (Pelanggaran) yang paling banyak ditemukan selama patroli pengawasan IUU Fishing oleh CDK antara lain 1)Tidak Memiliki / Tidak Membawa Izin diatas kapal (SIPI/SIKPI/BPKP) Peningkatan jumlah kasus yang ditangani disebabkan adanya peralihan system perizinan sehingga beberapa nelayan belum memperbarui dokumen izin yang dimiliki 2) Menggunakan Alkap Terlarang /Trwals 3) Izin Habis Masa Berlakunya (daluarsa / tidak memiliki ke ,4) Menggunakan handak / bom ikan

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya sasaran V

Tabel 42. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya pada Sasaran V

Sasaran	Indikator	Capaian (%)	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persen Capaian Realisasi anggaran	Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 – 7
Sasaran V : meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan	Rasio Kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial (%)	149,52	Program pengawasan SDKP	12.593.872.046	12.434.342.380	98,73	23,23 (efisien)
	Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	161,64	Program pengelolaan kelautan pesisir dan PPK	13.237.337.031	12.664.503.505	95,67	
	Peresntase penurunan tindakan IUU Fishing	50,01					
Rata-rata capaian		120,39		25.831.209.077	25.098.845.885	97,16	

Dari hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dapat dikatakan bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang efisien, karena capaian kinerja menunjukkan persentase keberhasilan yang lebih tinggi daripada persentase realisasi penggunaan anggaran. Hal ini disebabkan capaian 2 indikator sasaran melebihi angka 100 % yaitu rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial karena

pelimpahan kewenangan sesuai UU 23 tahun 2014 dan proporsi tangkapan ikan ikan dalam batasan biologis yang aman karena produksi tangkap yang meningkat.

Hal ini sesuai dengan materi yang disampaikan pada acara FGD Evaluasi kinerja anggaran tahun 2021 dan peningkatan kinerja anggaran satker lingkup KKP 16 Maret 2022 oleh Subdit Teknologi Infomrasi penganggaran Kementerian Keuangan bahwa **Yang mempengaruhi efisiensi adalah :**

- c. capain indikator sasaran
- d. Penyerapan anggaran

Untuk memperoleh efisiensi yang optimal :

- e. Capaian indikator sasaran **diatas target** dengan penyerapan anggaran **sesuai** pagu yang dialokasikan
- f. Capaian indikator sasaran **diatas target** dengan penyerapan anggaran **kurang** dari pagu yang dialokasikan

Capaian indikator sasaran **sesuai target** dengan penyerapan anggaran **kurang** dari pagu yang dialokasikan

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sasaran V).

Sasaran meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan SDKP melalui program sebagai berikut :

❖ **Program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil dengan sub kegiatan :**

- Pengawasan pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil yaitu dilaksanakan pengawasan terhadap biota laut yang dilindungi yaitu penyu sisik dan pemberdayaan kelompok pengawas sebanyak 45 pokmaswas.

- Pengawasan usaha perikanan tangkap sampai dengan 12 mil dilaksanakan patroli pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan oleh 7 CDK, pengadaan sarana dan prasarana pengawasan yaitu sebanyak 30 unit yaitu 7 unit perahu pokmaswas, 14 unit perlengkapan pokmawas, speedboat pengawasan 5 unit, drone pengawasan 3 unit, dan steiger 1 unit.



n gadaan speedboat pengawas serta sosialisasi IUU fishing di unit kerja CDK Maminsata

❖ **Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kegiatan pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil diluar minyak dan gas bumi terdiri dari sub kegiatan:**

- Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat dengan capaian output yaitu penetapan pencadangan kawasan Liukang Tuppabiring Pangkep dan kawasan Liukang Tangaya kabupaten Pangkep. sarana dan prasarana kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berupa sarana prasaran penanganan sampah 3 unit di Pulau Buhung Loe Desa Pulua Buhung Pitue Kec Pulau Sembilan, Pulau Buhung Loe Desa Pulua Buhung Pitue Kec Pulau Sembilan, Pulau Libukang Kec. Bangkala di Jeneponto. Regulasi Konservasi dan Penataan Ruang Laut berupa Sosialisasi Perda RTRW integrasi RZWP3K, Penetapan KKD Kabupaten

Pangkep, Pencetakan Peta Zonasi Wilayah Pesisir & PPK, Dokumen Pengelolaan dan Rencana Aksi WP3K berupa penyesuaian data dan peta RZWP3K Prov Sul Sel dan pencetakan peta zonasi wilayah pesisir dan PPK.



Pengad

aan sarana prasarana penanganan sampah (alat pres sampah) kepada kelompok diharapkan dapat mengurangi sampah di laut dan kelompok mendapatkan tambahan penghasilan dari pengolahan sampah tersebut

- Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan capaian output 13 unit tambatan perahu, rehabilitasi ekosistem pesisir 783.360 batang , rehabilitasi ekosistem laut 11 unit berupa apartemen ikan dan artificial reef serta pembinaan pantai berseri 9 lokasi.

Secara lengkap data target dan capaian output serta perbandingannya dengan tahun lalu dapat dilihat pada tabel di halaman lampiran.

Faktor pendukung keberhasilan

- ❖ Sarana prasarana pengawasan seperti speedboat pengawas , kapal pengawas, perlengkapan pengawasan untuk POKMASWAS yang mendukung kegiatan pengawasan
- ❖ Alokasi anggaran yang cukup mendukung untuk rehabilitasi eksosistem mangrove.

Hambatan/masalah yang dihadapi

- ❖ Belum tersedianya data base mangrove yang terupdate dan terkoordinasi antara Bidang Teknis, CDK dan Dinas Perikanan Kab/Kota sebagai bahan evaluasi dan perencanaan.
- ❖ Masih Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan di daerah, serta minimnya ketaatian dan kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen perizinan, termasuk surat pencatatan atau Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) di daerah

Solusi

- ❖ Penyusuna data base mangrove melibatkan unit kerja terkait dan kabupaten /kota.
- ❖ Melaksanakan pengawasan untuk meminimalisir tindakan destructive fishing dengan menggunakan sarana prasarana pengawasan yang ada dan melibatkan Pokmaswas yang ada.Melaksanakan pembinaan dan motivasi kepada masyarakat pengawas dan masyarakat pelaku usaha termasuk di sentra-sentra nelayan, pelabuhan/PPI/TPI, di laut dan diatas kapal

perikanan agar selalu taat hukum khususnya untuk memiliki dokumen perizinan usaha/BPKP.

3.3. REALISASI ANGGARAN

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi serta kewenangan yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tidak lepas dari adanya dukungan pembiayaan/penganggaran. Adapun Sumber pembiayaan pada tahun 2021 yang tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021, sebesar Rp. 2.502.070.000,- realisasi sebesar Rp. 2.728.377.800,- (109,04 %) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 43. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2021

Uraian	Target	Jumlah Anggaran Yang Teralisasi	% Capaian
RETRIBUSI DAERAH	2,502,070,000	2,728,377,800	109.04
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	765,740,000	1,063,100,100	138.83
(Pergub. No. 88 Thn 2018)			
<i>Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan</i>			
- Kerjasama Sarana Sistem Rantai dingin (Depo)	50,000,000	50,000,000	100.00
- Kerjasama Sewa Tambak	157,000,000	160,000,000	101.91
- Koperasi Pegawai	8,040,000	8,040,000	100.00
- Gedung Konservasi	-	-	-
- Sewa Rumah Dinas	36,000,000	35,363,000	98.23
<i>Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan</i>			
- Kerjasama Sewa Lahan (Kab.Sidrap)	7,500,000	7,500,000	100.00

Uraian	Target	Jumlah Anggaran Yang Teralisasi	% Capaian
Retribusi Pemakaian Laboratorium			
- Pemakaian alat Menguji untuk Lab BPMPP	500,000,000	802,197,100	160.44
Retribusi Pemakaian Ruang			
- Kantin Pegawai	7,200,000	-	-
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	304,330,000	237,249,500	77.96
<i>(Perda No. 12 Thn 2019)</i>			
- Coldstorage	25,000,000	33,900,000	135.60
- Jasa Hasil Lelang	148,500,000	5,265,000	3.55
- Kerjasama sewa Lahan	40,500,000	58,734,500	145.02
- Mobil Pendingin	-	-	-
- Pabrik Es	-	15,150,000	-
- Sewa Kios/Wisma	32,180,000	44,060,000	136.92
- Sewa Parkir R2, R4 dan Tambat Perahu	58,150,000	80,140,000	137.82
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	432,000,000	544,890,000	126.13
<i>(Perda No. 12 Thn 2019)</i>			
- Penjualan Hasil Benih dan Pembesaran (Ikan, Udang dan Rumput Laut)	432,000,000	544,890,000	126.13
Retribusi Penyelenggaraan Perizinan	1,000,000,000	882,895,000	88.29
<i>(Perda No.10 Thn 2011)</i>			
- Retribusi izin Usaha	1,000,000,000	882,895,000	88.29
Pendapatan Lain-lain yang sah			
- Denda		243,200	

Untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian intern Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan di dalam pelaksanaan anggaran tersebut dilaksanakan melalui rapat monitoring yang dilakukan setiap bulan serta monitoring evaluasi secara langsung di lapangan dengan peninjauan langsung kelokasi-lokasi pelaksanaan kegiatan.

b. Belanja

Untuk tahun 2021 ini, total alokasi belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp. 98.186.281.309,- dan total realisasi sebesar Rp 88.014.550.817,- (89,64 %), dan realisasi fisik 94,81 % .

Tabel 44. Realisasi Anggaran Dinas kelautan dan Perikanan TA. 2021

PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		REALISASI FISIK
		Rp	%	
1. Program Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kegiatan	14,745,700,677	13,980,139,905	94.81	97.11
1. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	13,237,337,031	12,664,503,505	95.67	96.78
Sub Kegiatan				
a. Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	1,711,986,200	1,685,376,250	98.45	100
b. Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan PulauPulau Kecil	11,525,350,831	10,979,127,255	95.26	96.30
Kegiatan				
2. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan PulauPulau Kecil	1,508,363,646	1,315,636,400	87.22	100
Sub Kegiatan				
a. Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan PulauPulau Kecil	407,600,000	219,120,000	53.76	100
b. Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan PulauPulau Kecil	1,035,221,646	1,032,107,000	99.70	100
c. Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Informasi Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	65,542,000	64,409,400	98.27	100
2. Program Pengelolaan perikanan tangkap Kegiatan	24,908,277,380	16,790,520,331	67.41	82.15
1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	11,647,671,074	4,115,516,900	35.33	64.57
Sub Kegiatan				
a. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	11,647,671,074	4,115,516,900	35.33	64.57

PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		REALISASI FISIK
		Rp	%	
Kegiatan 2. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai Danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi	6,453,395,501	5,903,076,800	91.47	95.06
Sub Kegiatan a. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	6,453,395,501	5,903,076,800	91.47	95.06
Kegiatan 3. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	6,807,210,805	6,771,926,631	99.48	100
Sub Kegiatan a. Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan c. Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	39,120,000 6,184,182,605 583,908,200	34,340,000 6,170,545,231 567,041,400	87.78 99.78 97.11	100 100 100
3. Program Pengelolaan perikanan budidaya	10,379,225,900	10,021,521,740	96.55	99.49
Kegiatan 1. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	10,379,225,900	10,021,521,740	96.55	99.49
Sub Kegiatan a. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut b. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut c. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota d. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota e. Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	1,859,920,000 273,000,000 7,776,102,400 83,824,000 386,379,500	1,743,874,000 272,672,140 7,602,685,600 59,195,000 343,095,000	93.76 99.88 97.77 70.62 88.80	97.42 100 100 93.62 100

PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		REALISASI FISIK
		Rp	%	
4. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	12,593,872,046	12,434,342,380	98.73	100
Kegiatan				
1. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	12,593,872,046	12,434,342,380	98.73	100
Sub Kegiatan				
a. Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan Mil	161,920,000	161,700,008	99.86	100
b. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan Mil	12,431,952,046	12,272,642,372	98.72	100
5. Program Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	1,700,829,096	1,662,551,848	97.75	100
Kegiatan				
1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1,700,829,096	1,662,551,848	97.75	100
Sub Kegiatan				
a. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	181,558,450	169,592,000	93.41	100
b. Pelaksanaan Bimbingan Fasilitasi Pemantauan dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan dan Berdaya Saing	1,519,270,646	1,492,959,848	98.27	100
6. Program Penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	33,858,376,210	33,125,474,613	97.84	99.49
Kegiatan				
1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,101,601,900	1,064,496,961	96.63	100
Sub Kegiatan				
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	203,065,500	195,483,500	96.27	100
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	75,738,500	74,869,000	98.85	100
c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	45,347,500	42,518,500	93.76	100
d. Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	27,060,000	23,045,000	85.16	100
e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	31,827,000	28,612,500	89.90	100
f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	699,530,900	685,291,461	97.96	100

PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		REALISASI FISIK
		Rp	%	
g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan	19,032,500	14,677,000	77.12	100
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23,963,987,020	23,769,828,056	99.19	100
Sub Kegiatan				
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23,797,388,020	23,606,689,056	99.20	100
b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	90,000,000	90,000,000	100.00	100
c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,895,000	2,270,000	78.41	100
d. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	27,092,000	25,772,000	95.13	100
e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	46,612,000	45,097,000	96.75	100
Kegiatan				
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	188,367,200	183,693,800	97.52	100
Sub Kegiatan				
a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	57,600,000	57,600,000	100	100
b. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	26,857,400	24,880,300	92.64	100
c. Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	103,909,800	101,213,500	97.41	100
Kegiatan				
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	3,191,240,499	2,924,074,434	91.63	94.67
Sub Kegiatan				
a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,348,383,499	2,122,875,250	90.40	93.18
b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	47,600,000	37,425,000	78.62	78.99
c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	128,229,000	123,595,000	96.39	100
d. Fasilitasi Kunjungan Tamu	67,649,000	58,173,000	85.99	100
e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	599,379,000	582,006,184	97.10	100
Kegiatan				
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,645,444,667	2,454,344,006	92.78	100
Sub Kegiatan				
a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	885,272,379	694,171,718	78.41	100
b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,760,172,288	1,760,172,288	100	100
Kegiatan				
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				99.87
	2,767,734,924	2,729,037,356	98.60	

PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		REALISASI FISIK
		Rp	%	
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	453,778,650	427,251,061	94.15	100
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	195,862,274	193,120,300	98.60	100
c. Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2,118,094,000	2,108,665,995	99.55	99.83
TOTAL	98.186.281.309	88.014.550.817	89,64	94,81

Realisasi fisik tidak mencapai 100 % disebabkan beberapa sub kegiatan tidak terlaksana atau tidak selesai 100 % diantaranya yaitu :

- Program pengelolaan kelautan pesisir dan PPK sub kegiatan rehabilitasi wilayah pesisir dan PPK yaitu Tambatan perahu pulau Lanjukang Rp 370.000.000 dan jasa konsultan pengawas Rp 11.450.000 tidak terlaksana karena dilokasi tersebut telah dibangun tambatan perahu oleh Pemerintah Kota Makassar, Tambatan perahu di Pulau Samalona Rp 448.990.902 terealisasi Fisik 90 % keuangan terealisasi Rp 125.697.271 (30 %) dilakukan perpanjangan kontrak sampai dengan tanggal 18 Januari 2022 rencananya akan dialokasikan untuk pembayaran di APBD Perubahan. Keterlambatan pekerjaan karena faktor cuaca.
- Program pengelolaan perikana tangkap sub kegiatan penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap Dari 14 kapal hanya terealisasi 3 kapal 100 %. Hal ini disebabkan keterlambatan pekerjaan akibat lambatnya terbit SPD dan faktor cuaca bahan baku terhambat. 1 unit alat tangkap bagang dan kapal tidak terlaksana karena kendala teknis di lapangan.
- Program pengelolaan perikana tangkap sub kegiatan Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap Pengadaan alat tangkap,

mesin dan perahu untuk kelompok nelayan Di Desa Katadong Kec Galesong Selatan Kab Takalar Rp 100.000 tidak terlaksana karena anggaran tidak mencukupi, Bangunan tancap Kelompok Nelayan Harapan Baru Desa Ponjale Kec Wara Timur Kota Palopo Rp 200.000.000 tidak terlaksana karena tempat pengambilan bahan baku susah diakses karena banjir dan jembatan putus, Pertemuan Bimbingan Teknis Penanganan Hasil Tangkapan Di Kapal tidak terlaksana karena lambatnya penyelesaian pekerjaan kapal sehingga waktu tidak mencukupi untuk pelaksanaan pertemuan

- Program pengelolaan perikanan budidaya subkegiatan penyediaan prasarana pembudidayaan ikan di laut Bantuan Sarpras Rumput Laut Klp. Nelayan Tetera, Klp. Nelayan Larafu, Kab. Kep. Selayar senilai Rp 48.000.000 tidak terealisasi karena kelompok calon penerima tidak memenuhi syarat teknis
- Program penunjang urusan pemerintah daerah sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Notebook 3 unit senilai Rp 36.138.700 tidak terlaksana karena spesifikasi barang sudah tidak ada di pasaran, pengadaan Videotron Rp 81.000.000 tidak terlaksana karena harga tidak mencukupi untuk pengadaan videotron tersebut.. Belanja komputer 2 unit Rp 43.063.800 tidak terealisasi karena spek barang yang dimaksud sudah tidak tersedia di pasaran.
- Program penunjang urusan pemerintah daerah sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga Pengadaan sofa beda Rp 10.000.000 tidak terlaksana karena karena pelaksana kegiatan menganggap kegiatan tersebut telah di refocusing

- Program penunjang urusan pemerintah daerah sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Rehab kantor CDK Selayar tidak dilaksanakan karena bukan aset Pemprov.

d. Penghargaan yang Diterima

Keberhasilan yang diraih ditahun 2021 adalah dengan diterimanya penghargaan :

1. Peringkat II Satuan Kerja Provinsi dengan Kinerja Terbaik oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan



2. Piagam penghargaan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai organisasi perangkat daerah paling responsive dalam rangka

penyusunan
metadata
sectoral
standar.

statistik
sesuai



3. Piagam penghargaan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai badan publik CUKUP INFORMATIF dalam implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan



BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis tahun 2021 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis /Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan.

Capaian kinerja KKP tahun 2021 mayoritas mencapai target dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, meskipun masih terdapat 1 indikator yang belum tercapai . Untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan upaya seperti koordinasi pelaksanaan dan monitoring evaluasi dalam rangka mencapai indikator kinerja utama. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerja sama dengan unit kerja di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kab/Kota serta lembaga terkait lainnya akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan semua stakeholder.

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain :

Secara umum rata-rata nilai capaian sasaran strategis tahun 2021 sebesar 119,11 % . Dari 5 sasaran strategis capainnya diatas 100 % sebagaimana tabel berikut :

KODE SASARAN STRATEGIS	NAMA SASARAN STRATEGIS	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN
SS1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat Daerah	102,93 %
SS II	Meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah produksi dan produktivitas produksi	154,0 %
SS III	Meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan	114,79 %
SS IV	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan	104,94 %
SS V	Meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan	118,9 %
Rata-Rata Capaian		119,11 %

- a. Dari 10 Indikator sasaran strategis /indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2021, terdapat 1 (satu) indikator yang capaiannya kategori **rendah** atau mencapai 50,01 % sebagaimana tabel berikut:

KODE SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN
SS1	Nilai sakip perangkat daerah (%)	99,73 %
	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah (%)	109,07%
	Persentase Nilai Temuan Material LHP yang ditindaklanjuti (%)	100 %
SS II	Produksi perikanan (ton)	103,64 %
	Kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB Perikanan(%)	204,35 %
SS III	Konsumsi Ikan	114,79 %
SS IV	Nilai tukar nelayan (NTN)	104,94 %
SS V	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial (%)	149,52 %
	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	157,11 %
	Persentase penurunan tindakan IUU Fishing	50,01 %
Rata- Rata capaian		119,32 %

- b. Tahun 2021, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan mengelola anggaran sebesar 98.186.281.309,- dan total realisasi sebesar Rp 88.014.550.817,- (89,64 %), dan realisasi fisik 94,81 % yang terbagi menjadi 6 program 14 kegiatan dan 44 subkegiatan. Realisasi fisik tidak mencapai 100 % karena terdapat beberapa kegiatan yang tidak/belum selesai 100 %.

Tindak lanjut :

Memperhatikan analisis capaian kinerja sebagaimana diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya dan dalam rangka upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2021 beberapa rekomendasi dan upaya tindak lanjut yang bisa dilakukan dalam rangka perbaikan kedepan:

- a. Indikator Sasaran startegis Penurunan tindakan IUU fishing hanya mencapai target 50,01 % disebabkan masih rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha perikanan tangkap yaitu hanya mencapai 63,87 % dari target 87,48 %. Langkah yang akan dilakukan untuk peningkatan kinerja organisasi adalah melaksanakan pengawasan untuk meminimalisir tindakan destructive fishing dengan menggunakan sarana prasarana pengawasan serta melibatkan Pokmaswas. Melaksanakan pembinaan dan motivasi kepada masyarakat pengawas dan masyarakat pelaku usaha termasuk di sentra-sentra nelayan, pelabuhan/PPI/TPI, di laut dan diatas kapal perikanan agar selalu taat hukum khususnya untuk memiliki dokumen perizinan usaha. Melakukan penanganan kasus yang diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang tidak patuh.
- b. Produksi garam hanya mencapai target 2,78 % disebabkan usaha garam masih di dominasi oleh petambak garam tradisional tanpa adanya sentuhan teknologi dan murni bergantung pada faktor cuaca. Curah hujan yang tinggi pada bulan Mei – Desember dan gelombang pasang sehingga memperpendek masa produksi akibatnya banyak petambak garam yang gagal produksi. Langkah yang akan diakukan adalah

- untuk menunjang capaian produksi garam yaitu pemberdayaan petani garam berupa bantuan sarana prasarana usaha garam dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas garam.
- c. Cakupan Bina Kelompok Nelayan terealisasi sebesar 19,11 % atau mencapai 79,98 % dari target. Hal ini disebabkan tahun 2021 target pembinaan kelompok sebanyak 75 kelompok terealisasi 60 kelompok dari target cakupan keseluruhan kelompok sebanyak 314. Faktor penghambat capaian kinerja adalah persyaratan teknis bantuan tidak dapat dipenuhi oleh kelompok yang diusulkan dan keterbatasan anggaran karena untuk mendukung program prioritas lainnya seperti penyediaan sarana prasarana pelabuhan sehingga pengalokasian anggaran tidak sepenuhnya terpenuhi untuk pembinaan kelompok nelayan.. Diperlukan Koordinasi dengan pihak kabupaten/kota dan penyuluh untuk usulan kelompok nelayan yang sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan.
 - d. Persentase ketersediaan benur berkualitas terrealisasi 96,90 % dari target. Hal ini disebabkan dari target ketersediaan 21.500.000 benur terealisasi 20.834.500 benur. Tidak tercapainya target disebabkan karena dilakukan rehab sarana prasarana perbenihan sehingga produksi benur tidak maksimal di tahun 2021. Diperlukan upaya untuk peningkatan produksi sehingga UPT PBAPL dapat beroperasi secara optimal dilaksanakan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana fisik pemberian yang menunjang produksi dan penyediaan lebih awal sarana pendukung perbenihan seperti pakan di akhir tahun 2020 untuk mendukung persiapan perbenihan di awal tahun
 - e. Persentase Pembinaan mutu produk perikanan dilaksanakan melalui pengujian mutu produk perikanan dimana jumlah pengujian mutu produk perikanan di tahun 2019 sebesar 1.508 sampel, di tahun 2020 sebesar 1.492 sampel dan tahun 2021 turun menjadi 1.056 Faktor penghambat tidak tercapainya target disebabkan karena dampak kondisi pandemi sehingga permintaan pengujian menurun dan adanya

kerusakan alat untuk pengujian logam berat sehingga pengujian tidak optimal berjalan di akhir tahun 2020 dan mulai optimal berjalan di bulan April tahun 2021. Tindak lanjut yang dapat dilakukan melaksanakan inovasi sejuta ikan yaitu inovasi untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan berupa pengambilan sampel dan pengantaran sertifikat hasil uji yang dilakukan oleh petugas UPT tanpa dipungut biaya. Jumlah hari pengujian pun lebih singkat yaitu dari 12 hari menjadi 6 hari. Selain itu dilakukan validasi sarana dan prasarana laboratorium secara rutin untuk memastikan sarana prasarana pengujian berfungsi dengan baik

- f. Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Perikanan mencapai target 56,37 % karena adanya refocusing anggaran pada tahun 2020 sehingga pengadaan sarana prasarana pendukung produksi perikanan di tahun 2020 teralokasi hanya 1 unit dari target 12 unit sehingga dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 jumlah sarana prasarana yang tersedia adalah 28 unit dari target keseluruhan sarana prasarana yang tersedia sebanyak 99 unit. Tindak lanjut yang dapat dilaksanakan adalah alokasi anggaran untuk pencapaian target dan Koordinasi dengan kabupaten kota terkait data sarana prasarana yang mendukung produksi perikanan seperti tambatan perahu, sarana prasarana garam dll.